



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2022**

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2022

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban yang memuat informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan Laporan Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strateginya. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi Instansi Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja dengan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Selain itu, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsisten penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan dalam penyusunan laporan kinerja selanjutnya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menjadi salah satu bahan pertimbangan ataupun pedoman untuk perbaikan kinerja dan pelayanan di masa yang akan datang.

Teluk Dalam, 09 Januari 2023

Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan,



SWASTI ELISABET DUHA, S.Kep., Ns., M.K.M

Pembina

NIP. 19810810 200112 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: inspektoratkab.nisel@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023.

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,
Sekretaris.



SONAYAWAN GEE, SE., M.A.P.
Pembina
NIP. 19730111 200804 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan Tahun Anggaran 2022 sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja sebagaimana visi dan misi organisasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta indikator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 adalah **“Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”**. Maksud Nias Selatan Maju adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat sedangkan maksud Masyarakat Sejahtera adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penjabaran dari Visi tersebut anatara lain:

1. **Nias Selatan Maju** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada di tengah masyarakat.

2. **Masyarakat Sejahtera** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materiil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi untuk mewujudkan Visi dengan mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien. Visi tersebut dimanifestasikan kedalam 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan.
2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, perlu meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perlindungan dan anak, pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta pencegahan dan penanganan stunting melalui peningkatan asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan lebih baik dan akuntabel yaitu melakukan peningkatan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	3
1.4 Susunan Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
2.1 Latar Belakang.....	12
2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	12
2.3 Perencanaan Anggaran	14
2.4 Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2 Akuntabilitas Keuangan	47
BAB IV PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan Tahun 2021 - 2026	13
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan Tahun 2021 - 2026	13
Tabel 2.3 Renja Kerja Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2022	17
Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian	32
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan Tahun 2022	32
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Organisasi Perempuan yang Aktif, Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan Tahun 2022	33
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Layak Anak, Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan Tahun 2022	35
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Penanganan Kasus Kekerasan Kepada Anak Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	36
Tabel 3.6 Target Pemenuhan Permintaan Masyarakat Peserta KB Baru Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kontrasepsi Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan Tahun 2022	37
Tabel 3.7 Target Pemenuhan Permintaan Masyarakat Peserta KB Baru Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kontrasepsi Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan Tahun 2021	40
Tabel 3.8 Perbandingan Target Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Peserta KB Baru Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan Tahun 2022	42
Tabel 3.9 Pencapaian Penggunaan Alat Kontrasepsi, Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	43
Tabel 3.10 Jumlah Tempat Pelayanan KB, Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	43
Tabel 3.11 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	47
Tabel 3.12 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Renja dan Kegiatan Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	48

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Data Kepegawaian Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	11
Grafik 1.2 Data Kepegawaian Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	11
Grafik 3.1 Prevalensi Balita Stunted Per Kecamatan Kab. Nias Selatan	45
Grafik 3.2 Perbandingan grafik persentase data stunting Kab. Nias Selatan Berdasarkan SSGI dan EPPGBM	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Aksi Tahun 2022
2. Pohon Kenerja Tahun 2022
3. PK Berdasarkan DPA Murni Tahun Anggaran 2022
4. PK Berdasarkan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2022
5. PK Berdasarkan DPA Murni Tahun Anggaran 2023
6. Dokumentasi Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instansi yang wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun LAKIP Tahun 2022 yang merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen perencanaan. Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja di awal Tahun Anggaran 2022.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan dokumen LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu dokumen pelaporan yang tidak dapat terlepas dari

substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya, yang dijabarkan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

- Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026 Kabupaten Nias Selatan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan;
 17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;
 18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan;

1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Secara garis besar permasalahan utama/isu-isu strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan meliputi:

1. Penggerakan dan Pelayanan KB;
2. Pencegahan dan penanganan stunting melalui peningkatan asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita;
3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kualitas dan kompetensi SDM perencana bagi Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
5. Pemberdayaan keluarga sejahtera dalam penanganan stunting

1.4 Susunan Organisasi

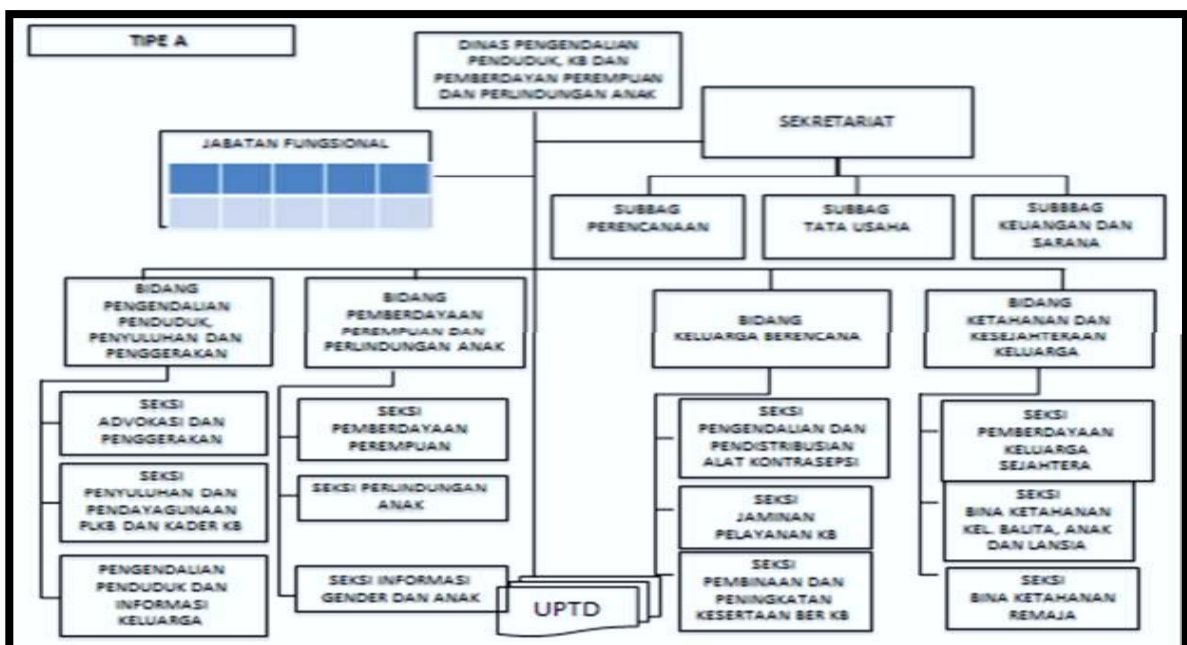
1.4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, maka susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Sarana.
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 - a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Anak;
 - c. Seksi Informasi Gender dan Anak.
5. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB.
6. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Seksi Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
7. Unit Pelaksana Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.2 Bagan Organisasi



1.4.3 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, maka tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian pengembangan penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi antara lain:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 2) Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah.
 - 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 4) Penetapan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan.
 - 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 6) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga berencana.
 - 7) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lingkungan Kabupaten Nias Selatan, termasuk dana, sarana dan prasarana.
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan;

- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris melaksanakan fungsi:
 - 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 2) Penyusunan rencana program dan anggaran.
 - 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.
 - 4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.
- c. Sekretaris dibantu 3 (tiga) Subbagian, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.
 - 2) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.
 - 3) Subbagian dan Keuangan dan Sarana, mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
- 3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan di Kabupaten Nias Selatan.
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan Fungsi
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 3) Pelaksanaan NSPK di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 4) Pelaksanaan Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas Penduduk.

- 5) Pelaksanaan Pemetaan perkiraan (Parameter) Pengendalian Penduduk di Kabupaten Nias Selatan.
 - 6) Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 7) Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB).
 - 8) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 9) Pemberian bimbingan Teknis dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 10) Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas :
- 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan
Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan Penggerakan.
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB,
Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP
 - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga,
Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
- a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Nias Selatan.
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Fungsi :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 3) Pelaksanaan NSPK di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 4) Pelaksanaan sistem informasi Gender dan Anak serta pengelolaan Website (e-gov).
 - 5) Pelaksanaan Pemantauan, analisis, Evaluasi dan pelaporan, Penerapan kebijakan Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data tentang informasi Gender dan Anak.
 - 6) Pemberian bimbingan Teknis dan fasilitasi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 7) Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas :
- 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan,
Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang.
 - 2) Seksi Perlindungan Anak
Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pemenuhan hak anak terkait hak sipil, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan Budaya.
 - 3) Seksi Informasi Gender dan Anak.
Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Informasi gender dan Anak serta pengelolaan website (e- Gov).
5. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana di Kabupaten Nias Selatan.

- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Fungsi :
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana.
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana.
 - 3) Pelaksanaan Penyelenggaraan norma, Standar prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana.
 - 4) Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian alat obat Kontrasepsi di kabupaten Nias Selatan.
 - 5) Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten Nias Selatan.
 - 6) Pelaksanaan Pembinaan Kesertaan be KB di Kabupaten Nias Selatan.
 - 7) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di bidang Keluarga Berencana.
 - 8) Pemberian bimbingan Teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana.
 - 9) Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Keluarga Berencana dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas :
- 1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian ALOKON, Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian Alokon di Kabupaten Nias Selatan.
 - 2) Seksi Jaminan Pelayanan KB, Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Jaminan Pelayanan KB di Kabupaten Nias Selatan.
 - 3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB, Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Peningkatan kesertaan Ber KB.
6. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
- a. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Nias Selatan.
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, menyelenggarakan Fungsi :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis daerah di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

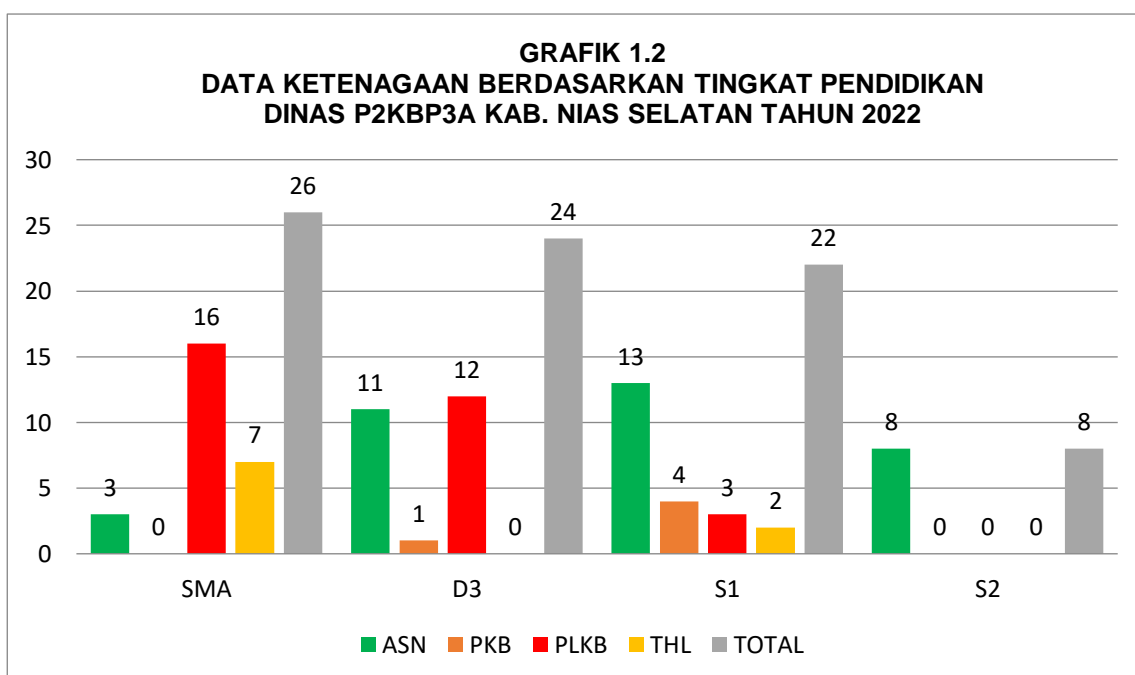
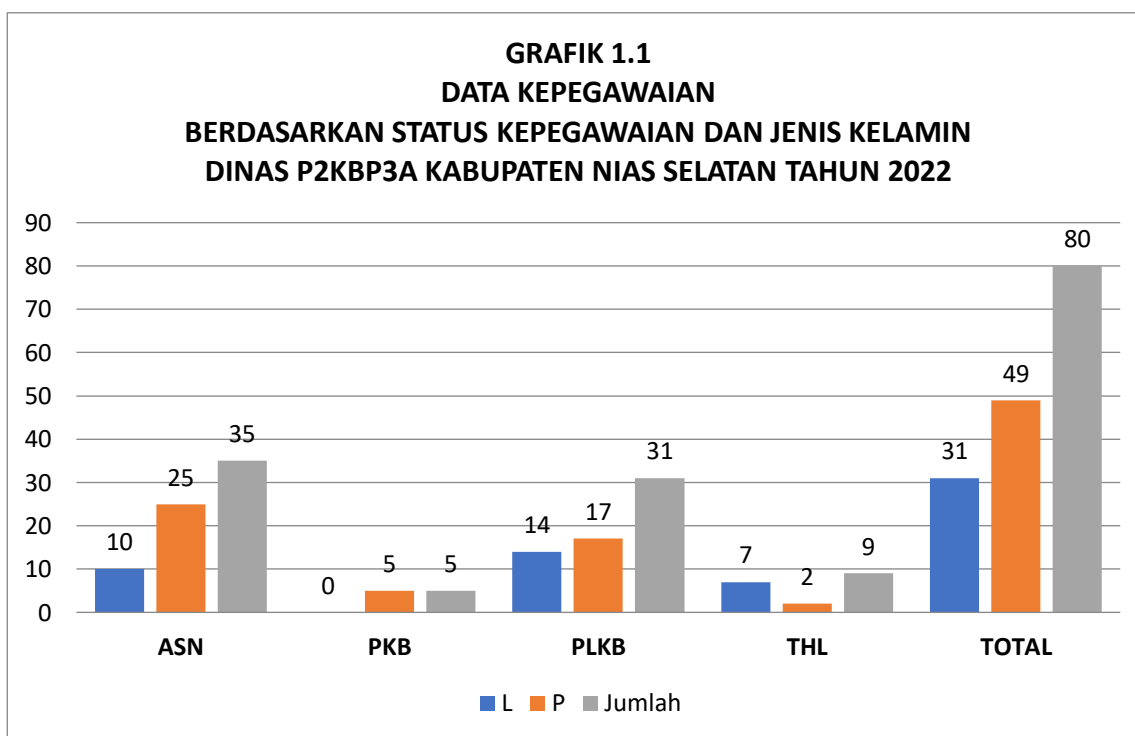
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 3) Pelaksanaan NSPK di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 4) Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Pembinaan Ketahanan Remaja.
 - 5) Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan.
 - 6) Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui Usaha mikro Keluarga.
 - 7) Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 8) Pemberian Bimbingan Teknis dan Fasilitasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 9) Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas :
- 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
 - 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita
Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan ketahan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
 - 3) Seksi Bina Ketahan Remaja
Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan Ketahanan Remaja

1.4.4 Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidak seimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah ke depan.

Untuk itu Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan akan berupaya secara terus menerus setiap tahunnya melakukan peningkatan dan penguatan sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna mencapai pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu Bupati selaku kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan anak serta keluarga berencana. Tentunya hal tersebut dapat terlaksana dengan dukung sumber daya aparatur dan dukungan kapasitas asset/modal pendukung

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD, maka program dan kegiatan Dinas P2KBPA Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan oleh 80 Orang, yang terdiri dari ASN berjumlah 35 orang, PKB berjumlah 5 orang, PLKB berjumlah 31 orang, THL berjumlah 9 orang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan Dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan Potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah kabupaten Nias Selatan.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni periode tahun 2021 – tahun 2026 bertujuan untuk Akiuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan yang merupakan Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun. Didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan satu tahun mendatang.

2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan tujuan ini, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021 dapat diuraikan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan
Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Terwujudnya birokrasi dan terkelola pemerintah yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah
2	Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan
Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintah	Nilai Lakip
		Indeks kepuasan masyarakat
2	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Persentase KB Aktif
		Angka Unmet Need KB
		Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL (Tribina) di Kabupaten Nias Selatan
		Total Fertility Rate (TFR)

2.3 Perencanaan Anggaran

Tabel 2.3
Renja Kerja
Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
			2022		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	100	%	8.524.266.089
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 Dok	9	Dok	45.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dok	1	Dok	7.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dok	1	Dok	7.500.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dok	1	Dok	7.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dok	1	Dok	7.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1 Dok	1	Dok	7.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi	4 Dok	4	Dok	7.500.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	21 Dok	20 Dok	4.612.766.089
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	4.590.266.089
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Dok	1 Dok	7.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	4 Dok	4 Dok	7.500.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1 Dok	1 Dok	7.500.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	0 Dok	1 Dok	10.000.000
Koordinasi dan penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	10.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	0 Org	70 Org	70.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	0 Stell	70 Stell	70.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	0 Org	- Org	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100 %	1.038.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	94 Buah	1 Buah	10.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	200 Buah	150 Buah	80.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	200 Buah	150 Buah	80.000.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12	Bulan	250.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12	Bulan	85.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	150	Kali	500.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	12	Bulan	33.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	29 Unit	-	Unit	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	-	unit	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14		Unit	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	-	Unit	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	-	Unit	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	ada	ada /tidak ada	Ada	148.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400	350	Buah	3.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Buah	12	Bulan	15.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Buah	12	Bulan	15.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas untuk pelayanan umum kantor	8 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	Orang / Bulan	115.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	40 Unit	51	Unit	2.600.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1	Unit	20.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25	Unit	80.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	25	25	Unit	2.500.000.000
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		0 Dok	6	Dok	4.000.000
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Dok	6	Dok	4.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	2 Dok	2	Dok	-
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2	Keg	-
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kabupaten/ Kota				

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokmen	2 Dok	4.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	- Dok	-
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			-	-
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kew+K8enangan Kabupaten/Kota	2	- Dok	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	-	- Keg	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan kordinasi Kewenangan Kabupaten /Kota			-	-
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	-	- Org	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Layanan	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota			-	-

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	- Laporan	-
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Spesifik	10 Org	- Org	-
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	- Dok	-
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			-	-
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14 PD	- PD	-
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dok	- Dok	-
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lap	- Laporan	-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	- Lembaga	-
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5x Layanan	- Kali	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data diTingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dok	- Dok	-
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	- Dok	-
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Org	- Org	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	- Dok	-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	- Org	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	- Dok	-

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dok	- Dok	-
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			-	-
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			-	-
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dok	- Dok	-
Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dok	- Dok	-
Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dok	- Dok	-
Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Kegiatan	- Kegiatan	-
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan	- Kegiatan	-
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	- Kegiatan	-
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-	-
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dok	- Dok	-
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dok	- Dok	-

Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System /Peringatan Dini)			-	-
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit	- Unit	-
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dok	- Dok	-
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			82	1.828.250.000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			-	-
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0 Dok	- Dok	-
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	23 Unit	- Unit	-
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0 Dok	- Dok	-
Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK			-	-
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kampung KB	- Kampung KB	-

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Balai Penyuluhan KB	-	Balai Penyuluhan KB	-
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	35 Kecamatan	-	35 Kecamatan	-
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			-		-
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	kecamatan	-	Kecamatan	-
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumla Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB yang Tersedia	Paket			
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kegiatan	-	Kegiatan	-
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			4		500.000.000
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes	-	Faskes	-
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	PLKB/PKB	-	PLKB/PKB	-
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Org	-	Org	-

Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Faskes	-	Faskes	-
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	-	Unit	-
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes	-	Faskes	-
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	PLKB/PKB	-	PLKB/PKB	-
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kegiatan	4	Kegiatan	500.000.000
Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	org	-	Org	-
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			78		1.328.250.000
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kampung KB	78	Kampung KB	1.328.250.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			539		3.397.800.000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			539		3.367.800.000
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kampung KB	78	Kampung KB	1.155.000.000

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Paket	-	Paket	-
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	461 Desa	461	Desa	2.212.800.000
Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dok	-	Dok	-
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					30.000.000
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kegiatan	1	Kegiatan	30.000.000
TOTAL					13.754.316.089

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2022 menjadi tumpuan untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Nias Selatan tahun 2022. Perjanjian Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). DP2KBP3A Kabupaten Nias Selatan telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagai berikut :

a. Berdasarkan DPA Murni

NO	SASARAN STRATEGGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintah	Nilai Lakip	C
		Indeks Kepuasan Masyarakat	C
2	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Persentase KB aktif	45%
		Angka Unmet Need KB	45%
		Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL (Tribina) di Kabupaten Nias Selatan	80%
		Total fertility Rate (TFR)	3,5

Rincian Anggaran Tahun 2022 berdasarkan Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	723.985.800
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	110.400.000
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.084.612.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.128.170.000
TOTAL		9.047.167.800

b. Berdasarkan DPA Perubahan

NO	SASARAN STRATEGGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintah	Nilai Lakip	C
		Indeks Kepuasan Masyarakat	C
2	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Persentase KB aktif	45%
		Angka Unmet Need KB	45%
		Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL (Tribina) di Kabupaten Nias Selatan	80%
		Total fertility Rate (TFR)	3,5

Rincian Anggaran Tahun 2022 berdasarkan Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	375.506.800
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	110.400.000
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.084.611.800
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.128.170.000
TOTAL		8.698.688.600

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja.

Dalam pengertian lainya, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistemik dan di dasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Untuk menghitung persentase capaian target kinerja digunakan rumus sederhana sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Penetapan Indikator Kinerja merupakan proses Pengidentifikasian, Pengembangan dan Penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja merupakan kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Disamping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi / unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi / unit kerja pelaksana.

Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing - masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan

Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan sebab berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidaknya-tidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil

Dalam upaya pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yakni data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau data eksternal. Data-data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder.

Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun atau dikembangkan diatas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat.

Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangkamengukur pencapaian tujuan- tujuan organisasi.

Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

Terdapat beberapa metode / cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi / instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara / metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara / metode tersebut. Beberapa cara / metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis dan dianggap terbaik dalam bidangnya
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar.

Secara umum Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 adalah sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja.

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan DPPPA Provinsi Sumatera Barat dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan

ditetapkan klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja dengan penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Amat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53%-68%	Cukup
4	< 53%	Kurang

Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan untuk tahun 2022 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 yang diturunkan pada Rencana Kerja Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Pencapaian kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 yang didukung dengan dana APBD Kabupaten Nias Selatan, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, diantaranya adalah :

a. Membandingkan antara target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Renstra di Tahun 2022	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintah	Nilai Lakip	C	C	100%	C	Amat Baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat	C	C	100%	C	Amat Baik
2	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Persentase KB aktif	45%	40%	89%	45%	Amat Baik
		Angka Unmet Need KB	45%	45,89%	101,98%	45%	Amat Baik
		Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL (Tribina) di Kabupaten Nias Selatan	80%	50%	63%	80%	Baik
		Total fertility Rate (TFR)	3,5	3,18	90,86%	3,5	Amat Baik

Secara keseluruhan kinerja tahun 2022 melebihi target kinerja karena hampir semua berada dikategori 85% - 100%. Ini menggambarkan katagori amat baik.

b. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan.

Pada prinsipnya, perempuan di Indonesia khususnya Kabupaten Nias Selatan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar yang menjamin bahwa seluruh warga Negara sama kedudukannya di muka hukum. Disamping itu, Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kenyataannya telah dibuktikan bahwa perempuan telah banyak mengalami kemajuan dalam berbagai aspek.

Untuk meningkatkan kualitas dan sumberdaya dan peran perempuan untuk terciptanya kesejahteraan dan peran aktif dari organisasi perempuan. Indikator yang mendukungnya adalah persentase organisasi perempuan yang masih aktif atau masih eksis keberadaan dalam pemberdayaan perempuan. Dibawah ini merupakan capaian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Organisasi Perempuan yang Aktif
Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja	Organisasi Perempuan	Aktif 2022	Capaian	Ket
1	Persentase organisasi perempuan yang aktif	3	3	100%	Amat Baik

Kinerja tersebut merupakan data jumlah organisasi perempuan sebanyak 3 organisasi sedangkan dikategorikan masih aktif perannya sebagai kelembagaan organisasi perempuan pada tahun 2022. Untuk meningkatkan persentase organisasi perempuan yang aktif, Dinas P2KBP3A kab. Nias Selatan telah melaksanakan pembinaan kepada organisasi perempuan sesuai dengan target dari Indikator Kinerja yang telah di tetapkan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak azazi manusia, pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan. Perempuan sampai dengan sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan sangat dibutuhkan karena kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus terbesar dari tindak kekerasan yang dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai dampak ketimpangan dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang berakibat pada timbulnya

dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan perempuan.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga Negara, maka pada tanggal 30 Maret 2021 telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Nias Selatan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan, telah dilakukan upaya dan tindak lanjut atas perlindungan perempuan dianggarkan untuk melaksanakan sasaran strategis ini. Indikatornya adalah :

$$\begin{array}{l} \text{Rasio perempuan korban} \\ \text{kekerasan per 1000 penduduk} \\ \text{perempuan usia 18 tahun ke atas} \\ \text{di tingkat daerah Kab/Kota} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Perempuan Korban} \\ \text{Kekerasan} \\ \text{Jumlah Penduduk} \\ \text{Perempuan Usia 18 Tahun} \\ \text{keatas di Kabupaten} \end{array}}{\text{Penduduk}} \times 1.000$$

Data terkait dengan kekerasan perempuan yang terdiri dari kekerasan terhadap perempuan, perempuan sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban tahun 2022 tidak tersedia atau tidak dilaporkan.

Pada pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan, dan upaya tindak lanjut atas perlindungan perempuan ini telah berjalan efektif.

c. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta kesejahteraan anak supaya terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia, serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Oleh sebab itu dalam rangka pemenuhan hak anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak telah dilakukan beberapa upaya dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Langkah-langkah dilakukan untuk pencapaian kinerja program dan kegiatan telah dilakukan penyusunan, pengkoordinasian, dan harmonisasi berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi. Selanjutnya pendampingan teknis dalam

penyusunan program, kegiatan dan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kota Layak Anak adalah suatu kota yang mengintegrasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah/swasta, media masa termasuk anak itu sendiri dan lain-lain dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Layak Anak
Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja	Jumlah Kabupaten	Realisasi Kabupaten Layak Anak	Capaian	Ket
1	Kabupaten Layak Anak	1	0	0%	Kurang

Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 belum terlaksana. Untuk mencapai hal tersebut, merupakan beban bersama yang melibatkan berbagai lini sektor dan stakeholder dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. Untuk diketahui bersama bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 telah ditetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di kabupaten Nias Selatan. Gugus yang telah terbentuk tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin menjadi salah satu faktor belum terbentuknya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nias Selatan.

Rasion anak yang memerlukan perlindungan khusus di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 di tingkat Kabupaten} = \frac{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus}}{\text{Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun di Kabupaten}} \times 1.000$$

Tabel 3.5
 Capaian Indikator Kinerja Penanganan Kasus Kekerasan Kepada Anak
 Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Anak)	Kasus Terlaporkan	Rasio	Kasus Tertangani	Capaian	Ket
1	2021	70482	8	11,350%	8	100%	Amat Baik
2	2022	60891	25	41,057%	25	100%	Amat Baik

Berdasarkan penghitungan indikator sasaran di atas, maka didapatkan rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus korban kekerasan per 1.000 penduduk anak usia 0 - 9 tahun ke atas di tingkat daerah Kab/Kota adalah sebanyak 8 orang Tahun 2021 dan 25 orang pada Tahun 2022. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pencegahan, penanganan terhadap perlindungan khusus anak atas korban kekerasan mencapai 100% atau sangat baik. Mempertimbangkan kenaikan kasus pada tahun 2021 dan 2022, diharapkan dilakukan peningkatan efektifitas lembaga koordinasi layanan perlindungan khusus anak, dan upaya tindak lanjut atas perlindungan khusus anak dianggarkan untuk melaksanakan sasaran strategis.

d. Program Pelayanan Keluarga Berencana

Tabel 3.6
 Target Pemenuhan Permintaan Masyarakat
 Peserta KB Baru Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kontrasepsi
 Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH PDDK 2022	PUS 2022	PA 2022	TARGET PUS 2023	TARGET PA 2023	PESERTA KB BARU TAHUN 2023								TOTAL
							IUD	MOW	MOP	IMPLANT	SUNTIK	PIL	KONDOM	MAL	
1	LOLOMATUA	10.747	1117	471	2.364	1.206	0	0	0	80	100	20	5	0	205
2	GOMO	10.759	1225	79	2.367	1.207	0	0	2	35	50	10	5	0	102
3	LAHUSA	21.142	2097	460	5.074	2.588	0	5	0	100	150	25	5	0	285
4	HIBALA	8.136	490	207	1.790	895	0	0	0	30	100	10	5	0	145
5	PULAU-PULAU BATU	9.877	1166	334	2.173	1.086	0	0	0	50	50	10	5	0	115
6	TELUK DALAM	26.357	2793	947	6.326	3.226	20	15	1	150	400	50	10	0	646
7	AMANDRAYA	14.464	1142	324	3.182	1.623	4	5	1	80	100	10	6	0	206
8	LOLOWAU	10.093	1097	420	2.220	1.132	0	5	0	75	50	10	5	0	145
9	SUSUA	16.975	1225	158	3.735	1.905	0	0	0	35	100	10	5	0	150
10	MANIAMOLO	14.168	1255	628	3.117	1.590	5	8	0	80	50	50	10	0	203
11	HILIMEGAI	7.110	719	420	1.564	798	2	2	0	50	100	10	5	0	169
12	TOMA	14.043	1125	476	3.089	1.576	0	6	0	75	100	45	5	0	231

13	MAZINO	8.588	555	250	1.889	964	0	4	2	30	50	10	10	0	106
14	UMBUNASI	7.617	476	70	1.676	855	0	0	0	40	50	10	5	0	105
15	ARAMO	10.531	566	181	2.317	1.182	0	0	0	40	100	10	5	0	155
16	PULAU-PULAU BATU TIMUR	3.312	268	71	729	372	0	0	0	10	50	10	5	0	75
17	MAZO	12.826	1204	358	2.822	1.439	2	1	4	40	50	10	5	0	112
18	FANAYAMA	18.495	1881	586	4.069	2.075	2	8	0	85	100	50	10	0	255
19	ULUNOYO	12.475	1036	357	2.745	1.372	0	0	0	75	50	10	10	0	145
20	HURUNA	12.933	1055	437	2.845	1.423	0	2	0	85	50	10	5	0	152
21	O'O'U	9.071	842	453	1.996	998	10	0	0	65	50	10	5	0	140
22	ONOHAZUMBA	7.042	686	220	1.549	775	0	10	0	80	59	10	5	0	164
23	HILISALAWA'AHE	5.856	580	339	1.288	657	0	3	0	100	100	50	5	0	258
24	ULUSUSUA	11.093	793	195	2.440	1.245	0	0	0	40	100	10	5	0	155
25	SIDUA'ORI	11.544	1142	303	2.540	1.295	0	10	0	50	50	10	10	0	130
26	SOMAMBAWA	14.521	1478	125	3.195	1.629	10	10	0	86	100	50	10	0	266
27	BORONADU	7.636	673	49	1.680	857	0	0	0	20	50	10	5	0	85
28	SIMUK	2.074	207	10	477	239	0	0	0	10	50	10	5	0	75
29	PULAU-PULAU BATU BARAT	2.412	244	20	531	265	0	0	0	20	50	10	5	0	85
30	PULAU-PULAU BATU UTARA	3.985	269	25	877	447	0	0	0	20	50	10	5	0	85

31	TANAH MASA	4.975	357	28	1.095	547	0	0	0	20	50	10	5	0	85
32	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	10.620	1246	607	2.336	1.192	2	10	0	75	100	50	10	0	247
33	ONOLALU	8.695	1043	373	1.914	975	0	4	0	75	50	40	5	0	174
34	ULU IDANOTAE	7.404	534	85	1.629	814	0	0	0	25	50	10	5	0	90
35	IDANOTAE	10.394	823	30	2.287	1.166	0	0	0	40	100	10	5	0	155
JUMLAH		367.970	33.409	10.096	81.925	41.613	57	108	10	1.971	2.859	680	216	-	5.901

Tabel 3.7
Target Pemenuhan Permintaan Masyarakat
Peserta KB Baru Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kontrasepsi
Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	PUS 2021	PA 2021	PPM PER MIX KONTRASEPSI							KATEGORI		TOTAL PB
				IUD	MOW	MOP	IMPLANT	SUNTIK	PIL	KONDOM	MKJP	NON MKJP	
1	LOLOMATUA	1154	473	5	1	0	30	110	35	25	36	170	206
2	GOMO	1278	44	1	1	2	20	100	20	20	24	140	164
3	LAHUSA	2073	466	3	1	0	50	120	50	20	54	190	244
4	HIBALA	520	184	3	1	0	5	100	10	6	9	116	125
5	PULAU-PULAU BATU	1216	335	3	1	0	15	100	20	5	19	125	144
6	TELUK DALAM	2925	430	22	10	0	85	100	200	100	117	400	517
7	AMANDRAYA	1129	305	25	2	0	70	100	60	50	97	210	307
8	LOLOWAU	1145	392	10	2	0	50	100	50	35	62	185	247
9	SUSUA	1255	140	2	1	0	15	100	20	15	18	135	153
10	MANIAMOLO	1329	592	20	2	0	70	120	50	100	92	270	362
11	HILIMEGAI	747	285	2	1	0	25	100	50	20	28	170	198
12	TOMA	1187	303	5	2	0	10	150	150	60	17	360	377
13	MAZINO	558	236	1	2	1	20	100	50	10	24	160	184
14	UMBUNASI	487	80	1	0	0	15	100	20	5	16	125	141
15	ARAMO	580	189	2	0	0	10	100	50	10	12	160	172
16	PULAU-PULAU BATU TIMUR	291	71	1	0	0	10	100	10	5	11	115	126
17	MAZO	1259	252	1	0	2	15	105	20	10	18	135	153

18	FANAYAMA	1862	536	5	2	0	85	150	110	40	92	300	392
19	ULUNOYO	1074	343	1	1	0	20	100	50	10	22	160	182
20	HURUNA	1008	343	2	1	0	25	100	50	17	28	167	195
21	O'O'U	871	343	5	1	0	20	80	50	5	26	135	161
22	ONOHAZUMBA	689	252	2	1	0	20	100	70	5	23	175	198
23	HILISALAWA'AHE	596	130	2	1	0	20	100	50	5	23	155	178
24	ULUSUSUA	827	187	2	0	0	10	45	50	5	12	100	112
25	SIDUA'ORI	1191	315	2	1	0	10	100	50	15	13	165	178
26	SOMAMBAWA	1544	89	2	1	1	25	100	50	15	29	165	194
27	BORONADU	697	53	2	0	0	10	100	50	5	12	155	167
28	SIMUK	184	12	1	0	0	5	20	10	5	6	35	41
29	PULAU-PULAU BATU BARAT	253	20	1	0	0	5	100	20	5	6	125	131
30	PULAU-PULAU BATU UTARA	286	27	1	0	0	5	100	20	5	6	125	131
31	TANAH MASA	161	32	1	0	0	5	25	20	5	6	50	56
32	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	1297	569	20	6	0	70	100	135	40	96	275	371
33	ONOLALU	1032	390	10	2	0	20	104	50	20	32	174	206
34	ULU IDANOTAE	546	67	1	0	0	2	75	20	10	3	105	108
35	IDANOTAE	834	34	1	0	0	5	80	20	10	6	110	116
JUMLAH		34085	8519	168	44	6	877	3384	1740	718	1095	5842	6937

Tabel 3.8

Perbandingan Target Pemenuhan Permintaan Masyarakat Peserta KB Baru
Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021			SELISIH (%)
		PUS	SASARAN	CAPAIAN	PUS	SASARAN	CAPAIAN	
1	LOLOMATUA	1117	205	18,35%	1154	206	17,85%	0,50%
2	GOMO	1225	102	8,33%	1278	164	12,83%	-4,51%
3	LAHUSA	2097	285	13,59%	2073	244	11,77%	1,82%
4	HIBALA	490	145	29,59%	520	125	24,04%	5,55%
5	PULAU-PULAU BATU	1166	115	9,86%	1216	144	11,84%	-1,98%
6	TELUK DALAM	2793	646	23,13%	2925	517	17,68%	5,45%
7	AMANDRAYA	1142	206	18,04%	1129	307	27,19%	-9,15%
8	LOLOWAU	1097	145	13,22%	1145	247	21,57%	-8,35%
9	SUSUA	1225	150	12,24%	1255	153	12,19%	0,05%
10	MANIAMOLO	1255	203	16,18%	1329	362	27,24%	-11,06%
11	HILIMEGAI	719	169	23,50%	747	198	26,51%	-3,00%
12	TOMA	1125	231	20,53%	1187	377	31,76%	-11,23%
13	MAZINO	555	106	19,10%	558	184	32,97%	-13,88%
14	UMBUNASI	476	105	22,06%	487	141	28,95%	-6,89%
15	ARAMO	566	155	27,39%	580	172	29,66%	-2,27%
16	PULAU-PULAU BATU TIMUR	268	75	27,99%	291	126	43,30%	-15,31%
17	MAZO	1204	112	9,30%	1259	153	12,15%	-2,85%
18	FANAYAMA	1881	255	13,56%	1862	392	21,05%	-7,50%
19	ULUNOYO	1036	145	14,00%	1074	182	16,95%	-2,95%
20	HURUNA	1055	152	14,41%	1008	195	19,35%	-4,94%
21	O'O'U	842	140	16,63%	871	161	18,48%	-1,86%
22	ONOHAZUMBA	686	164	23,91%	689	198	28,74%	-4,83%
23	HILISALAWA'AHE	580	258	44,48%	596	178	29,87%	14,62%
24	ULUSUSUA	793	155	19,55%	827	112	13,54%	6,00%
25	SIDUA'ORI	1142	130	11,38%	1191	178	14,95%	-3,56%
26	SOMAMBAWA	1478	266	18,00%	1544	194	12,56%	5,43%
27	BORONADU	673	85	12,63%	697	167	23,96%	-11,33%
28	SIMUK	207	75	36,23%	184	41	22,28%	13,95%
29	PULAU-PULAU BATU BARAT	244	85	34,84%	253	131	51,78%	-16,94%
30	PULAU-PULAU BATU UTARA	269	85	31,60%	286	131	45,80%	-14,21%
31	TANAH MASA	357	85	23,81%	161	56	34,78%	-10,97%
32	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	1246	247	19,82%	1297	371	28,60%	-8,78%
33	ONOLALU	1043	174	16,68%	1032	206	19,96%	-3,28%
34	ULU IDANOTAE	534	90	16,85%	546	108	19,78%	-2,93%
35	IDANOTAE	823	155	18,83%	834	116	13,91%	4,92%
JUMLAH		33.409	5901	17,66%	34085	6936,72	20,35%	-2,69%

Realisasi peningkatan persentase peserta KB aktif MKJP maupun non MKJP pada tahun 2022 berdasarkan kecamatan terbesar adalah kecamatan Hilisalawa'ahe sebesar 14,62% jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Tabel 3.9
Pencapaian Penggunaan Alat Kontrasepsi
Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja	Jumlah Target	Pengguna Alat Kontrasepsi	Target Kinerja	Capaian	Ket
1	Persentase KB Aktif	14.752	5.901	45%	40%	Amat Baik

Pada Tahun 2022, pencapaian penggunaan alat kontrasepsi secara keseluruhan mencapai 40% dari Target yang telah ditetapkan sebesar 14.752.

Kenaikan capaian kinerja MKJP ini diupayakan dengan pengadakan baik KIE, Konseling maupun pelayan KB khususnya pelayanan MKJP juga melalui pelayanan pendekatan kepada masyarakat. Data capaian peserta KB Aktif MKJP dapat diketahui dari hasil laporan Pengendalian Lapangan. Ketersediaan tempat Pelayanan KB dilapangan memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam mencapai target.

Tabel 3.10
Jumlah Tempat Pelayanan KB
Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

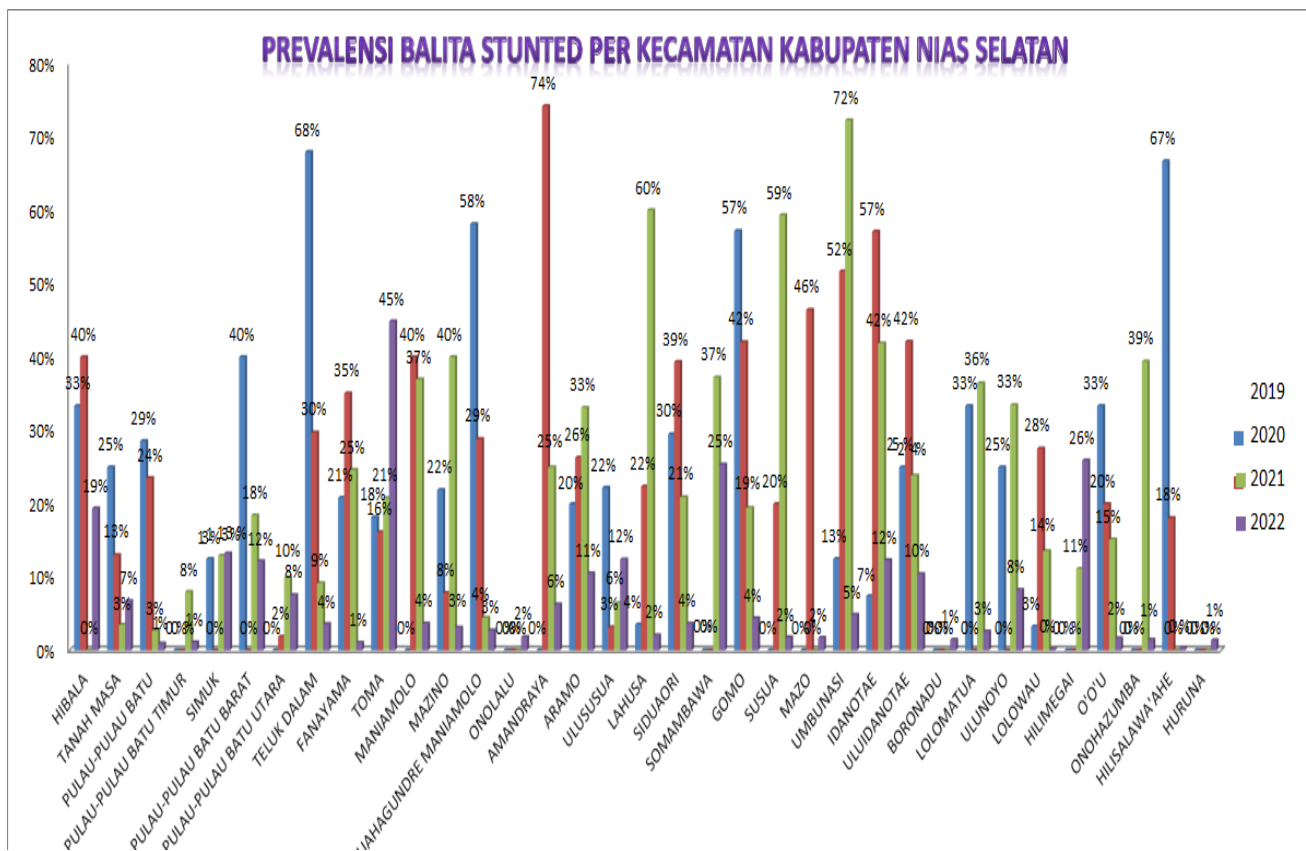
KODE	KECAMATAN	JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB
1	2	3
01	LOLOMATUA	1
02	GOMO	1
03	LAHUSA	1
04	HIBALA	2
05	PULAU-PULAU BATU	1
06	TELUK DALAM	7
07	AMANDRAYA	1
08	LOLOWAU	1
09	SUSUA	1
10	MANIAMOLO	1
11	HILIMEGAI	1
12	TOMA	1
13	MAZINO	1
14	UMBUNASI	1
15	ARAMO	1

16	PULAU-PULAU BATU TIMUR	1
17	MAZO	1
18	FANAYAMA	1
19	ULUNOYO	1
20	HURUNA	1
21	O'O'U	1
22	ONHAZUMBA	1
23	HILISALAWA'AHE	2
24	ULUSUSUA	1
25	SIDUA'ORI	1
26	SOMAMBAWA	1
27	BORONADU	1
28	SIMUK	1
29	PULAU-PULAU BATU BARAT	1
30	PULAU-PULAU BATU UTARA	0
31	TANAH MASA	1
32	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	1
33	ONOLALU	1
34	ULU IDANOTAE	1
35	IDANOTAE	1
Jumlah Total		42

e. Membandingkan Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam kegiatan Penanganan Stunting

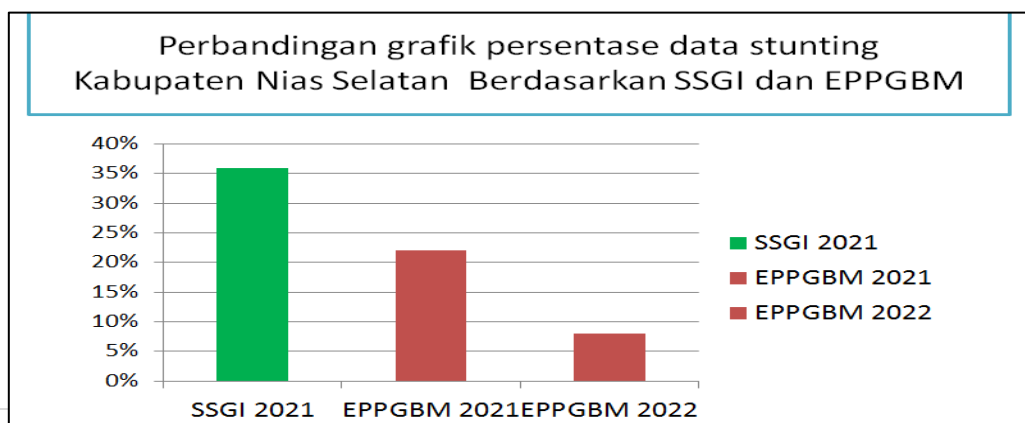
Analisis Prevalensi Balita Stunted Tingkat Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2019 s/d 2022. Kabupaten Nias Selatan memiliki 35 kecamatan (28 kecamatan tersebar di daratan dan 7 kecamatan di kepulauan), 461 desa/kelurahan (459 desa dan 2 kelurahan), dan 36 puskesmas (28 puskesmas di daratan dan 8 puskesmas di kepulauan).

Setiap kecamatan memiliki 1 puskesmas kecuali Kecamatan Hibala memiliki 2 puskesmas yaitu Puskesmas Hibala dan Hilianombasela. Sebaran prevalensi balita stunted per kecamatan Bulan Agustus pada 4 (empat) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

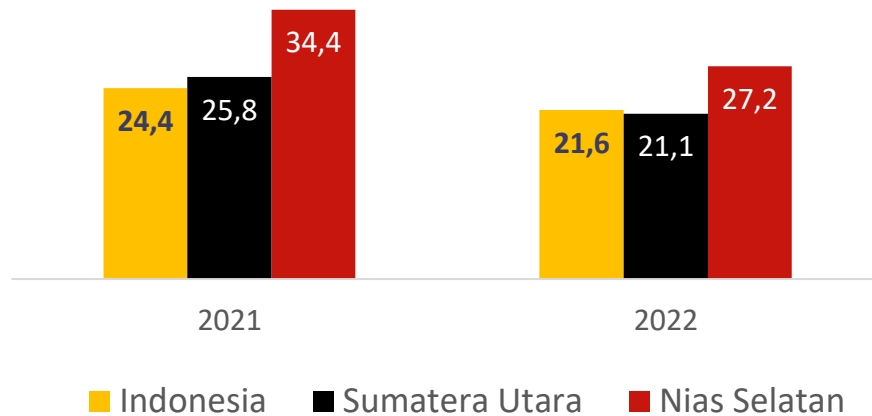


Berdasarkan grafik, kecamatan yang prevalensi balita stuntednya paling tinggi di tahun 2019 adalah Kecamatan Teluk Dalam 68% yang kemudian turun menjadi 30% di tahun 2020, turun menjadi 9% di tahun 2021 dan 4% di tahun 2022 dengan jumlah balita stunted sebanyak 108 di tahun 2019, 165 di tahun 2020, 96 di tahun 2021 dan 49 di tahun 2022.

Sedangkan untuk kecamatan yang prevalensi balita stuntednya paling tinggi di tahun 2022 adalah Kecamatan Toma yaitu sebesar 45%, yang pada tahun 2019 yaitu 18%, 16% di tahun 2020 dan 21% di tahun 2021 dengan jumlah balita stunted sebanyak 2 di tahun 2019, 76 di tahun 2020, 120 di tahun 2021 dan 214 di tahun 2022.



Angka Stunting



Pada Grafik tersebut dapat diketahui bahwa, intervensi program percepatan penanganan stunting di Kabupaten Nias Selatan, memberikan hasil yang positif. Hasil survey SSGI terkait Prevalensi stunting di Kabupaten Nias Selatan mengalami penurunan yang cukup berarti sebesar 7,2% atau pencapaian target sebesar 20,93%.

Masih rendahnya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nias selatan dipengaruhi dari berbagai faktor dan aspek, diantaranya tidak adanya rencana kerja TPPS, kegiatan koordinasi tidak berjalan, OPD tidak memahami peran dan fungsinya masing-masing sebagai TPPS dan tidak adanya satu data stunting.

Sementara berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia, bahwa pada Tahun 2024, kasus stunting menjadi 14%.

DINAS P2KBP3A
Sebagai
SEKRETARIAT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Fokus dalam Pelaksanaan RAN PASTI untuk mendukung percepatan penurunan stunting

menjadi **14%** melalui pendekatan keluarga

Peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021

PERATURAN PRESIDEN Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2022 Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan didukung oleh Anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. **8.698.688.600,-** (*Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*). Dari besaran anggaran tersebut, Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp. **6.971.258.360,-** (*Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*) atau tingkat capaian serapan sebesar 80,14 %.

Adapun Rincian Pagu dan realisasi Anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan dapat digambarkan seperti pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.11
Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program
Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	PAGU DPA (p)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	375.506.800	368.255.800	98,07
2	Program Pengendalian Penduduk	110.400.000	0	0
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.084.611.800	4.945.533	97,26
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.128.170.000	1.657.469.560	52,99
TOTAL		8.698.688.600	6.971.258.360	80,14

Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rencana Kerja dan Kegiatan
Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		DPA PERUBAHAN		PERSEN T		
				Target	ANGGARAN	PAGU	REALISAI ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	100 %	8.531.766.089	375.506.800	368.255.800	98,07%		
01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11 Dok	11 Dok	52.500.000	15.159.800	15.159.800	100,00%	
01	2.01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	1 Dok	1 Dok	7.500.000	3.001.800	3.001.800	100,00%
01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dok	1 Dok	7.500.000	3.019.000	3.019.000	100,00%
02	2.02	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	2 Dok	2 Dok	7.500.000	3.030.000	3.030.000	100,00%
01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dok	1 Dok	7.500.000	3.079.000	3.079.000	100,00%
01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dok	1 Dok	7.500.000	3.030.000	3.030.000	100,00%
01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1 Dok	1 Dok	7.500.000			#DIV/0!

		01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi	4 Dok	4 Dok	7.500.000			#DIV/0!
		01	201	6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	21 Dok	21 Dok	4.612.766.089	57.002.500	57.001.500	100,00%
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	4.590.266.089	54.001.000	54.000.000	100,00%
		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Dok	1 Dok	7.500.000	-	-	#DIV/0!
		01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan /semesteran SKPD yang tersusun	4 Dok	4 Dok	7.500.000	3.001.500	3.001.500	100,00%
		01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1 Dok	1 Dok	7.500.000			#DIV/0!
		01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	10.000.000	-	-	#DIV/0!
		01	2.03	3	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	10.000.000			#DIV/0!
		01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	70 Org	70 Org	70.000.000	-	-	#DIV/0!
		01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	70 Stell	70 Stell	70.000.000			#DIV/0!
		01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	0 Org	- Org				#DIV/0!
		01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100 %	1.038.000.000	96.878.500	96.166.500	99,27%

		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	94 Buah	1 Buah	10.000.000			#DIV/0!
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	200 Buah	150 Buah	80.000.000			#DIV/0!
		01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	200 Buah	150 Buah	80.000.000			#DIV/0!
		01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	250.000.000	18.000.000	18.000.000	100,00%
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	85.000.000	10.580.500	10.580.500	100,00%
		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	150 Kali	500.000.000	68.298.000	67.586.000	98,96%
		01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	33.000.000			#DIV/0!
		01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	29 Unit	- Unit	-	-	-	#DIV/0!
		01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	- unit				#DIV/0!
		01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14	Unit				#DIV/0!
		01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	- Unit	-			#DIV/0!
		01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	- Unit	-			#DIV/0!

		01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	ada	ada /tidak ada	Ada	148.500.000	118.200.000	118.200.000	100,00%
		01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400	350	Buah	3.500.000	3.000.000	3.000.000	100,00%
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Buah	12	Bulan	15.000.000			#DIV/0!
		01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Buah	12	Bulan	15.000.000			#DIV/0!
		01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas untuk pelayanan umum kantor	8 Orang/Bulan	8	Oran g/Bulan	115.000.000	115.200.000	115.200.000	100,00%
		01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	40 Unit	51	Unit	2.600.000.000	88.266.000	81.728.000	92,59%
		01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1	Unit	20.000.000	-	-	#DIV/0!
		01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25	Unit	80.000.000	9.800.000	3.262.000	33,29%
		01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	25	25	Unit	2.500.000.000	78.466.000	78.466.000	100,00%
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		0 Dok	8	Dok	4.000.000	-	-	#DIV/0!
2	08	02	201		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Dok	6	Dok	4.000.000	-	-	#DIV/0!

2	`08	`02	`201	`01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)	2 Dok	2 Dok				#DIV/0!
2	`08	`02	`201	`03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Keg				#DIV/0!
2	`08	`02	`202		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						#DIV/0!
2	`08	`02	`202	`02	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dok	4.000.000			#DIV/0!
2	`08	`02	`203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-	-	#DIV/0!
2	`08	`02	`203	`03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	- Dok				#DIV/0!
2	`08	`03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				-	-	-	#DIV/0!
2	`08	`03	`201		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-	#DIV/0!

2	`08	`03	`201	`01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	-	Dok	-			#DIV/0!
2	`08	`03	`201	`02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	-	-	Keg				#DIV/0!
2	08	03	202		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					-	-	-	#DIV/0!
2	08	03	202	`01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	-	-	Org	-			#DIV/0!
2	08	03	202	`02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten /Kota	-		Layanan				#DIV/0!
2	08	03	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-	-	-	#DIV/0!
2	08	03	203	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	-	Laporan	-			#DIV/0!
2	08	03	203	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10 Org	-	Org				#DIV/0!

2	08	03	203	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	- Dok	-			#DIV/0!
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				-	-		
2	08	04	201		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-		#DIV/0!
2	08	04	201	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	14 PD	- PD				#DIV/0!
2	08	04	201	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dok	- Dok				#DIV/0!
2	08	04	201	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lap	- Laporan				#DIV/0!
2	08	04	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	-		#DIV/0!
2	08	04	202	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	- Lembaga				#DIV/0!
2	08	04	203		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	-		#DIV/0!

2	08	04	203	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5x Layanan	-	Kali				#DIV/0!
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					-	-	-	#DIV/0!
2	08	05	201		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-	-	-	#DIV/0!
2	08	05	201	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dok	-	Dok	-			#DIV/0!
2	08	05	201	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	-	Dok	-			#DIV/0!
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								#DIV/0!
2	08	06	201		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					-	-	-	#DIV/0!
2	08	06	201	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Org	-	Org	-			#DIV/0!

2	08	06	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dok	-	Dok	-			#DIV/0!
2	08	06	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota					-	-	-	#DIV/0!
2	08	06	202	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	Org	-	Org	-			#DIV/0!
2	08	06	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	-	Dok	-			#DIV/0!
2	08	06	202	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dok	-	Dok	-			#DIV/0!
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					-	110.400.000	-	0,00%
2	14	02	201		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					-	-	-	#DIV/0!
2	14	02	201	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dok	-	Dok	-			#DIV/0!

2	14	02	201	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dok	-	Dok	-			#DIV/0!
2	14	02	201	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dok	-	Dok	-			#DIV/0!
2	14	02	201	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Kegiatan	-	Kegiatan	-			#DIV/0!
2	14	02	201	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan	-	Kegiatan	-			#DIV/0!
2	14	02	201	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	-	Kegiatan	-			#DIV/0!
2	14	02	202		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					-	110.400.000	-	0,00%
2	14	02	202	02	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dok	-	Dok	-	110.400.000	-	0,00%
2	14	02	202	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dok	-	Dok	-			#DIV/0!
2	14	02	202	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System /Peringatan Dini)					-	-	-	#DIV/0!

2	14	02	202	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit	-	Unit	-			#DIV/0!
2	14	02	202	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dok	-	Dok	-			#DIV/0!
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Rp	-	1.828.250.000	5.084.611.800	4.945.533.000	97,26%
2	14	03	201		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					-	1.092.723.900	1.016.158.900	92,99%
2	14	03	201	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0 Dok	-	Dok	-	1.092.723.900	1.016.158.900	92,99%
2	14	03	201	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	23 Unit	-	Unit	-			#DIV/0!
2	14	03	201	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0 Dok	-	Dok	-			#DIV/0!
2	14	03	201	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK					-	-	-	#DIV/0!

2	14	03	201	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kampung KB	-	Kampung KB	-			#DIV/0!
2	14	03	201	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Balai Penyuluhan KB	-	Balai Penyuluhan KB	-			#DIV/0!
2	14	03	201	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	35 Kecamatan	-	35 Kecamatan	-			#DIV/0!
2	14	03	202		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					-	2.212.800.000	2.184.000.000	98,70%
2	14	03	202	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	kecamatan	-	Kecamatan	-			#DIV/0!
2	14	03	202	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Paket						#DIV/0!

2	14	03	202	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kegiatan	-	Kegiatan	-	2.212.800.000	2.184.000.000	98,70%
2	14	03	203		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					500.000.000	451.222.900	420.204.100	93,13%
2	14	03	203	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes	-	Faske s	-	30.969.900	23.141.500	74,72%
2	14	03	203	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	PLKB/PKB	-	PLKB /PKB	-			#DIV/0!
2	14	03	203	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Org	-	Org	-			#DIV/0!
2	14	03	203	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Faskes	-	Faske s	-			#DIV/0!
2	14	03	203	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	-	Unit	-			#DIV/0!

2	14	03	203	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes	-	Faske s	-				#DIV/0!
2	14	03	203	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	PLKB/PKB	-	PLKB /PKB	-				#DIV/0!
2	14	03	203	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kegiatan	4	Kegia tan	500.000.000	420.253.000	397.062.600	94,48%	
2	14	03	203	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	org	-	Org	-				#DIV/0!
2	14	03	204		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					1.328.250.000	1.327.865.000	1.325.170.000	99,80%	
2	14	03	204	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kampung KB	78	Kamp ung KB	1.328.250.000	1.327.865.000	1.325.170.000	99,80%	
2	14	03	204	02	Pembinaan Terpadu Kampung KB		Kampung KB	78	Kamp ung KB				#DIV/0!	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					3.397.800.000	3.128.170.000	1.657.469.560	52,99%	
2	14	04	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					3.367.800.000	3.128.170.000	1.657.469.560	52,99%	

2	14	04	201	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kampung KB	78 Kampung KB	1.155.000.000	3.128.170.000	1.657.469.560	52,99%
2	14	04	201	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Paket	- Paket	-			#DIV/0!
2	14	04	201	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	461 Desa	461 Desa	2.212.800.000			#DIV/0!
2	14	04	201	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian+G133 Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dok	- Dok	-			#DIV/0!
2	14	04	202		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				30.000.000	-	-	#DIV/0!

2	14	04	202	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000			#DIV/0!
JUMLAH									3.761.816.089	8.698.688.600	6.971.258.360	80,14%

Realisasi anggaran pada tabel 3.4 Pagu dan Realisai Anggaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. **6.971.258.360** atau mencapai 80,14%.

Kurang maksimal penyerapan anggaran tersebut dikarenakan berbagai faktor diantaranya ketermbalatan pembentukan tim pendamping keluarga (TPK), belum tersedianya jaringan listrik di balai penyuluh, belum tersedianya jaringan internet di balai penyuluh, kurang maksimalnya TPK dalam melakukan pendampingan di lapangan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini merupakan Pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good Governance) Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pihak - pihak yang berkepentingan. LAKIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, baik berupa kinerja Kegiatan maupun kinerja Sasaran.

Pada tahun 2022, Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) item indikator kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 – 2026 dan dokumen Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah 2022.

Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang hendak dicapai, didukung oleh besaran anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2022 sebesar Rp. 8.698.688.600,- (Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi dengan serapan anggaran sebesar Rp. 6.971.258.360,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) atau tingkat capaian serapan sebesar 80,41 %.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa Pencapaian target terhadap beberapa Indikator Kinerja yang tercantum dalam RENSTRA Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan dan RENJA Tahun 2022 Belum dapat di penuhi 100%.

Demikian kiranya kekurangan dan kelemahan dimaksud menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk memperbaikinya di masa yang akan datang.

Teluk Dalam, 09 Januari 2023
Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan,



SWASTI ELISABET DUHA, S.Kep., Ns., M.K.M
Pembina
NIP. 19810810 200112 2 001

LAMPIRAN - 1
RENCANA AKSI
TA. 2022

RENCANA AKSI TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	TARGET (TRIWULAN)			
			I	II	III	IV
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintah	Nilai Lakip	√			
		Indeks Kepuasan Masyarakat				√
2	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Persentase KB aktif	√	√	√	√
		Angka Unmet Need KB	√	√	√	√
		Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL (Tribina) di Kabupaten Nias Selatan		√		√
		Total fertility Rate (TFR)	√	√	√	√

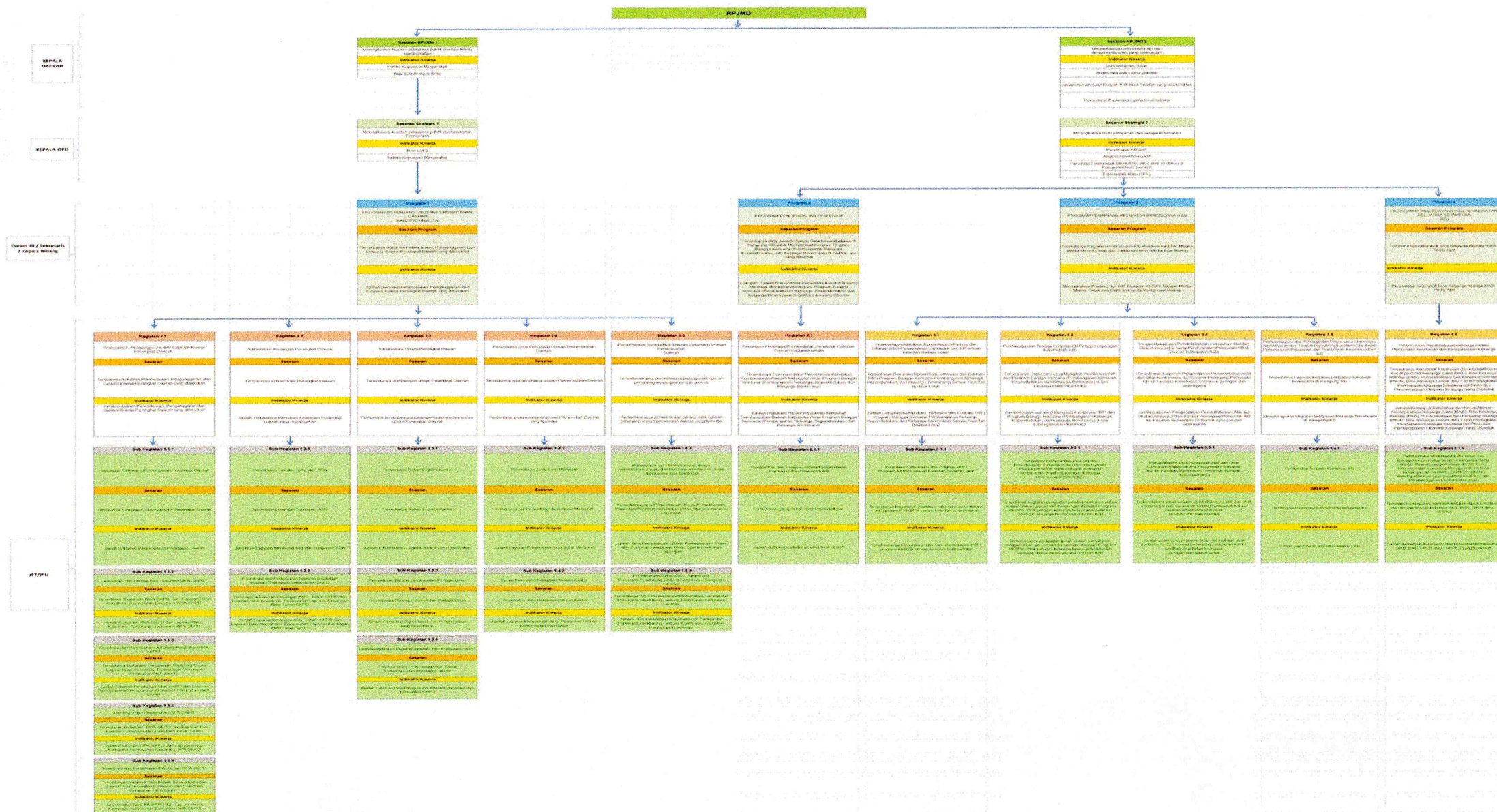
Program			Kegiatan			Anggaran	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan			
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	(Rp)		I	II	III	IV
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 Dok	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 DoK	15.159.800	Membuat perencanaan anggaran dan evaluasi				√
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	1 Dok	57.002.500	Menyusun dokumen keuangan	√	√	√	√
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	1 Dok	96.878.500	Melakukan penyediaan dukungan operasional kantor	√	√	√	√
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	1 Dok	118.200.000	Melakukan pembayaran gaji tenaga harian lepas	√	√	√	√
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang dipelihara	40 Unit	88.266.000	Melakukan pemeliharaan kendaraan roda 2			√	

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dok	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Kegiatan	110.400.000	Melaksanakan kegiatan pemetaan dan pengolahan kependudukan		√	√	√
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dok	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	1 Kegiatan	1.092.723.900	Melakukan kegiatan upaya KIE dalam program stunting	√	√	√	√
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	terlaksananya penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/ penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	1 Kegiatan	2.212.800.000	Melaksanakan kegiatan kegiatan lini lapangan program pelayanan KB dan Stunting	√	√	√	√

			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Pelayanan KB Bergerak	1 Kegiatan	451.222.900	Melakukan pendistribusian alokon di Faskes	√	√	√	√
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	terlaksananya pembinaan terpadu kampung KB	1 Kegiatan	1.327.865.000	Melakukan kegiatan pembinaan, penggaran dan tindakan pelayanan KB di Faskes	√	√	√	√
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Tersedianya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	78 Kampung KB	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	terbentuknya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS	1 Kegiatan	3.128.170.000	Melaksanakan kegiatan lini lapangan dalam upaya penanganan stunting dan pemberdayaan masyarakat	√	√	√	√

LAMPIRAN - 2
POHON KINERJA
TA. 2022

POHON KINERJA DINAS P2KBP3A KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022

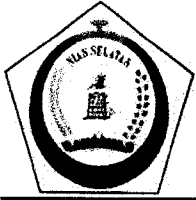


LAMPIRAN - 3

PERJANJIAN KINERJA

BERDASARKAN DPA MURNI

TA. 2022



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Fahuwusa Laia No. – Kompleks Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam, Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SANIMA SARUMAHA, SKM., M.AP**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **FIKTORYAMAN GE'E, SKM., M.MKes**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA

FIKTORYAMAN GE'E, SKM., M.MKes
Penata TK/1
NIP. 198306192010011027

PIHAK PERTAMA

SANIMA SARUMAHA, SKM., M.AP
Penata
NIP. 19870807 201001 2 029

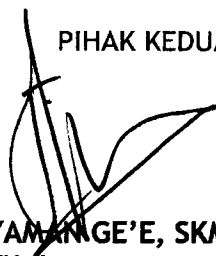
PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Mewujudkan administrasi perkantoran secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta Melaksanakan kegiatan surat menyurat secara cepat, tepat dan efektif.	1. Persentase pelayanan administrasi kantor yang meningkat 2. Persentase jumlah penerimaan dan pengiriman surat yang teragendakan.	100 % 100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.298.000	
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	

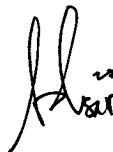
Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA



FIKTORYAN ANGE'E, SKM., M.MKes
 Penata TK.1
 NIP. 198306192010011027

PIHAK PERTAMA



SANIMA SARUMAHA, SKM., M.AP
 Penata
 NIP. 19870807 201001 2 029



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Fahuwusa Laia No. – Kompleks Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam, Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FRISMAN FANOLO HULU, SKM**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **FIKTORYAMAN GE'E, SKM., M.MKes**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA

FIKTORYAMAN GE'E, SKM., M.Mkes
Penata TK. I
NIP. 19830619 2010011027

PIHAK PERTAMA

FRISMAN FANOLO HULU, SKM
Penata
NIP. 19900201 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring dan pelaporan pelayanan publik yang berkualitas	1. Jumlah Dokumen perencanaan yang dibuat.	100 %
		2. Jumlah dokumen anggaran yang telah dibuat	100 %
		3. Jumlah dokumen laporan dan monitoring yang dibuat	80%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.001.800	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.019.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3.030.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.079.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.030.000	

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA



FIKTORYAMAN GE'E, SKM., M.Mkes
 Penata TK. I
 NIP. 19830619 2010011027

PIHAK PERTAMA



FRISMAN FANOLO HULU, SKM
 Penata
 NIP. 19900201 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Fahuwusa Laia No. – Kompleks Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam, Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RALATI MANAO, SKM**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Sarana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **FIKTORYAMAN GE'E, SKM., M.MKes**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA

FIKTORYAMAN GE'E, SKM., M.Mkes
Penata TK.
NIP. 19830619 2010011027

PIHAK PERTAMA

RALATI MANAO, SKM
Penata Muda
NIP. 19760525 200804 2 001

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN SARANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NIAS
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Tertatanya administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program.	1. Jumlah Dokumen SPP-LS, SPP-GU, SPP-TU yang suda diteliti dan diverifikasi. 2. Dokumen rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya 3. Jumlah Laporan Kegiatan Sub Bagian Keuangan	100 % 70% 100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.001.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.001.500	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.580.500	
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.200.000	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.800.000	
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.466.000	

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA




FIKTORYAMA NGE'E, SKM., M.Mkes
 Penata TK.
 NIP. 19830619 2010011027

RALATI MANAO, SKM
 Penata Muda
 NIP. 19760525 200804 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Fahuwusa Laia No. – Kompleks Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam, Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **APRILYADI DUHA**
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.,Ns.,M.K.M**
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan

Selaku Atasan Pihak Pertama,selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

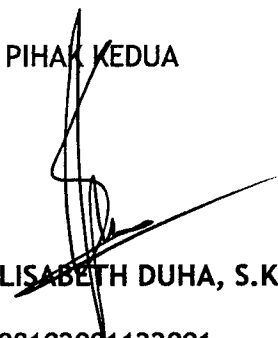
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.,Ns.,M.K.M
Pembina
NIP. 198108102001122001


APRILYADI DUHA
Penata Tk. I
NIP. 19670407 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

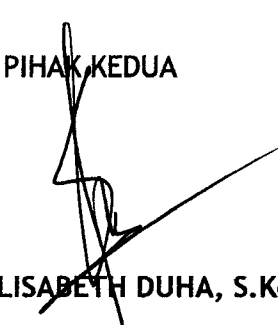
NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Tersedianya Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 Kegiatan
2.	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	terlaksananya penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas kelayra berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	1 Kegiatan
3	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	terlaksananya pembinaan terpadu kampung KB	1 Kegiatan

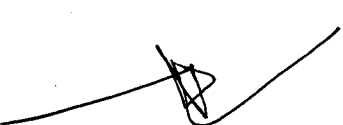
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Belanja Dukungan SIGA Paket Data Internet Pada Balai Penyuluahn KB	Rp. 69.000.000	
2	Biaya Komunikasi Pelacakan Kontak dan Pemantauan Covid (23 Kecamatan x 12 Bulanx 150.000)	Rp. 41.400.000	
3	Jasa Pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) 922 Orang	Rp 2.212.800.000	
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp1.328.250.000	

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.,Ns.,M.K.M
Pembina
NIP. 198108102001122001


APRILYADI DUHA
Penata Tk. I
NIP. 19670407 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

*Jalan Fahuwusa Laia, Komplek Baloho Indah Kec. Teluk Dalam
Kode Pos 22865, Email: p2kbp3anisel@gmail.com*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASASNIAT SRI JAYA SARUMAHA, SKM**
Jabatan : **Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan PLKB dan Keder KB**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **APRILYADI DUHA**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

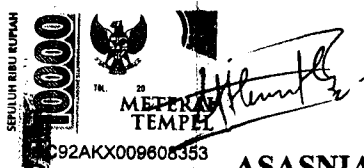
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 09 November 2022

Pihak Kedua,

APRILYADI DUHA
Penata Tk.I/III-d
NIP. 19670407 198903 1 005

Pihak Pertama,



ASASNIAT SRI JAYA SARUMAHA, SKM
Penata/III-c
NIP. 19870407 200903 2 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN
PENDAYAGUNAAN PLKB DAN KADER KB
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NIAS SELATAN**

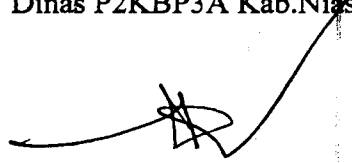
No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator kerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pembinaan terhadap PLKB dan Kader KB	Persentase PLKB dan Kader KB yang terbina per tahun	80%
2.	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana PLKB dan Kader KB	Persentase PLKB dan Kader KB yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana	35%


No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Kegiatan Peningkatan Peran serta Stakeholder dan Mitra Kerja dan Penggarapan Program KKBP	-	-
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	-	-
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Petugas Lapangan dan Mitra KB	-	-
4.	Kegiatan Pembinaan PLKB dan IMP		
Jumlah		-	-

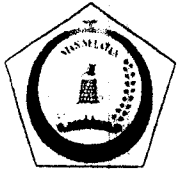
Teluk Dalam, 09 November 2022

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerak
Dinas P2KBP3A Kab.Nias Selatan

Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan
PLKB dan Kader KB
Dinas P2KBP3A Kab.Nias Selatan


APRILYADI DUHA
Penata Tk.I/III-d
NIP. 19670407 198903 1 005


ASASNIAT SRI JAYA SARUMAHA, SKM
Penata/ III-c
NIP. 19870407 200903 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl.Fahuwusa Laia No.-Komplek Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam.

Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERNELIS FRISKA RIANG ZAGOTO,AM.Keb**
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **APRILYADI DUHA**
Jabatan : Kepala Bidang P4
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 09 November 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

APRILYADI DUHA
NIP.19670407 198903 1 005



HERNELIS F.R ZAGOTO,AM.Keb
NIP.19881117 201001 2 007


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.NIAS SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terhimpunnya dan Terolahnya Data Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Data Pelayanan Keluarga Berencana	38 Faskes
2.	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan	Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi hasil kegiatan di lapangan	4 Kali


	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	-	-
2.	Kegiatan Pelatihan Penggunaan aplikasi system pencatatan dan pelaporan	-	-
3.			
4.			
5.			

Telukdalam, 07 November 2022

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
 Penyuluhan dan Penggerakkan.
 Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan


 APRILYADI DUHA
 Penata Tk.I/III.d
 NIP. 19670407 198903 1 005

Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan
 Informasi Keluarga.
 Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan


 HERNELIS F.R.ZAGOTO,AM.Keb
 Penata, III/c
 NIP. 19881117 201001 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Fahuwusa Laia Komplek Baloho Indah Kec.Teluk Dalam 22865

Email : p2kbp3anisel@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENDANG KHAMIYANTI BUULOLO. SKM
Jabatan : Plt.Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakkan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : APRILYADI DUHA
Jabatan : Kepala Bidang P4 Dinas P2KBP3A

Selaku atasan pihak pertama , selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 09 November 2022

Kepala Bidang P4
Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan

APRILYADI DUHA
Penata Tk. I
NIP. 19670407 198903 1 005



METRA
TELUK DALAM

7FAAKX009611812

Advokasi dan Penggerakkan
P2KBP3A Kab. Nias Selatan

ENDANG KHAMIYANTI BUULOLO, SKM
Penata Muda Tk. I
NIP. 19841118 201001 2 014

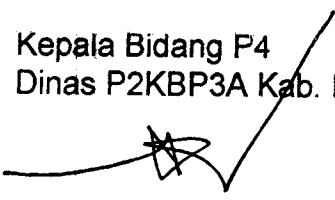
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN PENGGERAKKAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.NIAS SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Teredainya sarana KIE Kependudukan dan KB	Jumlah media KIE yang disediakan pertahun	11 Paket
2.	Teredainya dukungan sarana dan prasarana penyuluh/petugas/Kader KB	Persentase penyuluh/petugas/Kader KB yang mendapatkan dukungan sarana/prasarana	21 Kecamatan
3	Terfasilitasinya KIE melalui mupen	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap program KB	35 Kecamatan

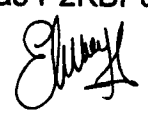
	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Kegiatan peningkatan peran serta stakeholder dan mitra kerja dalam penggarapan Program Bangga Kencana		
2.	Kegiatan Pembinaan program KB bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub-PPKBD)		
3.	Orientasi Program Bangga Kencana di tingkat Lini Lapangan		
4.	Pelayanan KIE		
5.			

Telukdalam, 09 November Februari 2022

Kepala Bidang P4
Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan


APRILYADI DUHA
Penata Tk. I
NIP. 19670407 198903 1 005

Plt.Kasi Advokasi dan Penggerakkan
Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan


ENDANG KHAMİYANTI BUULOLO, SKM
Penata Muda Tk. I
NIP. 19841118 201001 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Fahuwusa Laia No. – Kompleks Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam, Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RINI HATI DUHA, AM.Keb**
Jabatan : **Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.,.Ns.,M.K.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan**

Selaku Atasan Pihak Pertama,selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

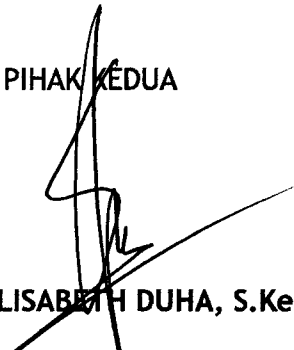
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.,.Ns.,M.K.M
Pembina
NIP. 198108102001122001


RINI HATI DUHA, AM.Keb
Penata Tk. I
NIP. 19850422 200804 2 001

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Tersedianya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	78 Kampung KB

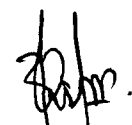
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) : Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Rp 3.128.170.000	

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.,Ns.,M.K.M
Pembina
NIP. 198108102001122001


RINI HATI DUHA, AM.Keb
Penata Tk. I
NIP. 19850422 200804 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Fahuwusa Laia, Komplek Baloho Indah Kec. Teluk Dalam
Kode Pos 22865, Email: p2kbp3anisei@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dies Natalis Gaurifa, AM.d**
Jabatan : Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Rini Hati Duha, Am.Keb**
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas P2KBP3A

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangkapemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 08 November 2022

Pihak Kedua,

Rini Hati Duha, Am.Keb
Penata Tk I.
Nip. 198504222008042001

Pihak Pertama,

Dies Natalis Gaurifa, AM.d
Penata
Nip. 198905272011012003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA DINAS P2KBP3A
KAB.NIAS SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Merencanakan kegiatan seksi Bina Ketahanan Remaja	Pendataan kelompok Bina Keluarga Remaja	78 Kampung KB
2.	Melaksanakan kegiatan seksi Bina Ketahanan Remaja	Jumlah kelompok PIK R dan Bina Ketahanan Remaja yang sudah terbentuk dan di lakukan pembinaan	20 kelompok
3.	Fasilitasi Pengembangan Ketahanan Bina Keluarga Remaja dan pusat Informasi Konseling Remaja	Jumlah Kelompok yang sudah melaksanakan kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja	20 Kelompok
4.	Menyusun dokumen kegiatan seksi Bina Ketahanan Remaja	Jumlah SK kelompok Bina Ketahanan Remaja	78 Kampung KB

	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Pendataan Produk Unggulan	-	
2.	Pembinaan Kelompok	-	
3.	Pendataan kelompok yang sudah melaksanakan kegiatan	-	
4.	Menyusun dokumen	-	

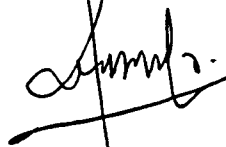
Telukdalam, 08 November 2022

Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera.
Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan



Rini Hati Duha, Am/Keb
Penata Tk I, III/d
NIP. 198504222008042001

Kasi Bina Ketahanan Remaja
Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan



Dies Natalis Gaurifa, AM.d
Penata, III/c
NIP. 19881231 201001 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Fahuwusa Laia, Komplek Baloho Indah Kec. Teluk Dalam
Kode Pos 22865, Email: p2kbp3anisek@gmail.com*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Widiawati Bu'ulolo, SKM**
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Rini Hati Duha, Am.Keb**
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas P2KBP3A

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangkapemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 08 November 2022

Pihak Kedua,

Rini Hati Duha, Am.Keb
Penata Tk I.
NIP. 198504222008042001

Pihak Pertama,

Widiawati Bu'ulolo, SKM
Penata
Nip. 198905272011012003

✓

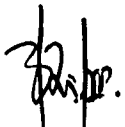
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA DINAS P2KBP3A
KAB.NIAS SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan keluarga sejahtera	Pendataan Produk Unggulan kelompok UPPKS	78 Kampung KB
2.	Melaksanakan kegiatan seksi pemberdayaan keluarga sejahtera	Jumlah kelompok UPPKS yang sudah terbentuk dan di lakukan pembinaan	20 kelompok
3.	Fasilitasi Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Jumlah Kelompok UPPKS yang sudah melaksanakan kegiatan	20 Kelompok
4.	Menyusun dokumen kegiatan seksi pemberdayaan keluarga sejahtera	Jumlah SK kelompok UPPKS	78 Kampung KB

	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Pendataan Produk Unggulan	-	
2.	Pembinaan Kelompok	-	
3.	Pendataan kelompok yang sudah melaksanakan kegiatan	-	
4.	Menyusun dokumen	-	

Telukdalam, 08 November 2022

Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera.
Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan

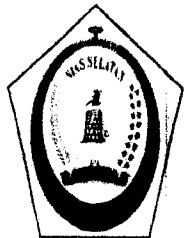


Rini Hati Duha, Am.Keb
Penata Tk I, III/d
NIP. 198504222008042001

Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan



Widiawati Bu'ulolo, SKM
Penata, III/c
NIP. 198905272011012003



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

*Jalan Fahuwusa Laia, Komplek Baloho Indah Kec. Teluk Dalam
Kode Pos 22865, Email: p2kbp3anisel@gmail.com*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURLINDA SIREGAR, AM. Keb**

Jabatan : Kepala Seksi Bina Ketahanan Kel. Balita, Anak dan Lansia

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **RINI HATI DUHA, AM. Keb**

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas P2KBP3A
Kabupaten Nias Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 07 November 2022

Pihak Kedua,

RINI HATI DUHA, AM. Keb

Penata, III/c

NIP. 19850422 200804 2 001

Pihak Pertama,

NURLINDA SIREGAR, AM. Keb

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19691026 199003 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI BINA KETAHANAN KEL. BALITA, ANAK DAN LANSIA**

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedianya instrumen berupa brosur atau leaflet dan KAK yang siap digunakan pada pembinaan ketahanan keluarga	Persentase keluarga yang telah memahami kegiatan pada pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia yang dipantau dengan baik	240-320 %
2	Tersedia dokumen dan laporan pembinaan kepada kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita, Anak dan Bina Keluarga Lansia	Jumlah pencapaian dokumen dan laporan pembinaan kepada kelompok kegiatan BKB, Anak dan BKL yang bermanfaat	20-24 Dokumen
3	Peningkatan pembentukan kelompok kegiatan BKB dan BKL yang siap digunakan	Jumlah pencapaian pembentukan kelompok kegiatan BKB dan BKL yang siap digunakan untuk pemberdayaan masyarakat	4-6 Dokumen
4	Medapatkan hasil evaluasi pembinaan keluarga balita, Anak dan lansia yang memuaskan	Persentase proses pembinaan kelompok kegiatan BKB, Anak dan BKL dapat terselesaikan dengan baik	12-16 %

No (1)	Kegiatan (2)	Anggaran (3)
1.	Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	

Teluk Dalam, 07 November 2022

Kepala Bidang K3,



RINI HATI DUHA, AM. Keb
Penata
NIP. 19850422 200804 2 001

Kepala Seksi Bina Ketahanan Kel. Balita, Anak dan Lansia,



NURLINDA SIREGAR, AM. Keb
Penata Tk. I
NIP. 19691026 199003 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Fahuwusa Laia No. – Kompleks Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam, Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **THERESIA DUHA, SKM**
Jabatan : **Kepala Bidang Kelurga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.,Ns.,M.K.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan**

Selaku Atasan Pihak Pertama,selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

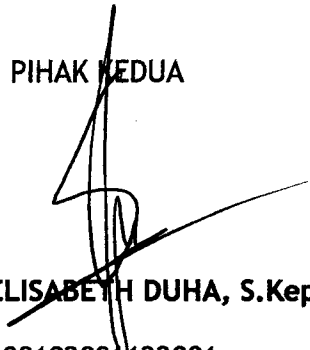
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.,Ns.,M.K.M
Pembina
NIP. 198108102001122001


THERESIA DUHA, SKM
Penata
NIP. 19740216 200502 2 002

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NIAS
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

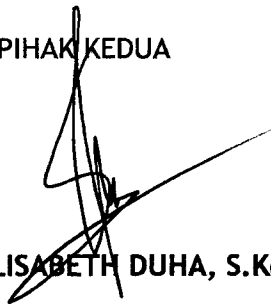
NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Terjalinnnya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai kearifan budaya lokal	Tersedianya komunikasi informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	1 Kegiatan
2.	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaring	Tersedianya Laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	1 Kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	<p>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri <p>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</p>	Rp 1.543.946.800	

Teluk dalam, November 2022

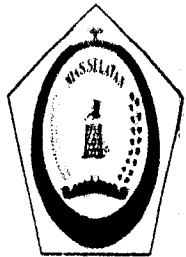
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA




SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.,.Ns.,.M.K.M
Pembina
NIP. 198108102001122001

THERESIA DUHA, SKM
Penata
NIP. 19740216 200502 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

*Jalan Fahuwusa Laia, Komplek Baloho Indah Kec. Teluk Dalam
Kode Pos 22865, Email: p2kbp3anisek@gmail.com*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FENTI SISWADI HALAWA, S. Kep., Ns., M.A.P**

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber - KB

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **THERESIA DUHA, SKM**

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 07 November 2022

Pihak Kedua,

THERESIA DUHA, SKM

Penata, III/c

NIP. 19740216 200502 2 002

Pihak Pertama

FENTI SISWADI HALAWA, S. Kep., Ns., M.A.P

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19760302 200502 1 002

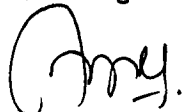
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESERTAAN BER - KB

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya administrasi pembinaan kesertaan ber-KB	Terlaksananya penyuluhan di tingkat kecamatan	150-200 Keluarga
2	Tersedia dokumen dan laporan Pelaksanaan pemberian bimbingan kepada peserta KB dilapangan dengan baik	Jumlah pencapaian laporan pada Pelaksanaan pemberian bimbingan kepada peserta KB yang terselesaikan dengan baik	10-15 Dokumen
3	Terbitnya pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauah dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber - KB	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur pada kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB yang selesai	2-4 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Pembinaan sasaran kesertaan ber-KB	

Teluk Dalam, 07 November 2022

Kepala Bidang KB,



THERESIA DUHA, SKM

Penata

NIP. 19740216 200502 2 002

Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB,



FENTI SISWADI HALAWA, S. Kep., Ns, M.A.P

Penata Tk. I

NIP. 19760302 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

*Jalan Fahuwusa Laia, Komplek Baloho Indah Kec. Teluk Dalam
Kode Pos 22865, Email:p2kbp3anisel@gmail.com*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NELI ROSMARIYANA LAIA, SKM., M.AP**
Jabatan : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **THERESIA DUHA, SKM**
Jabatan : Kepala Bidang KB Dinas P2KBP3A

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 09 November 2022

Pihak Kedua,

THERESIA DUHA, SKM
Penata
NIP. 19740216 200502 2 002

Pihak Pertama,

NELI ROSMARIYANA LAIA, SKM., M.AP
Penata
NIP. 19830615 200502 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA SEKSI JAMINAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NIAS SELATAN**

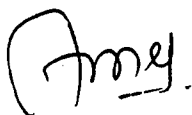
No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator kerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pelayanan TKBK Kecamatan	Jumlah Akseptor yang mendapatkan pelayanan TKBK	15 Kecamatan
2.	Terlaksananya Peran Serta Lintas Sektor untuk Menggerakkan Masyarakat dalam Pelayanan KB	Jumlah masyarakat yang dilayani menjadi akseptor KB pada kegiatan IBI KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, PKK KB Kes	300 orang
3.	Terlaksananya Penyuluhan Keluarga Berencana bagi PUS di Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Menerima Penyuluhan KB	10 Kecamatan

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Melaksanakan Perencanaan Program Pelayanan TKBK Kecamatan	-	-
2.	Melaksanakan Peran Serta Lintas Sektor untuk Menggerakkan Masyarakat dalam Pelayanan KB	-	-
3.	Melaksanakan Perencanaan Program Penyuluhan Keluarga Berencana bagi PUS di Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan	-	-
	Jumlah	-	-

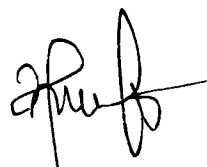
Teluk Dalam, 09 November 2022

Kepala Bidang KB Dinas P2KBP3A

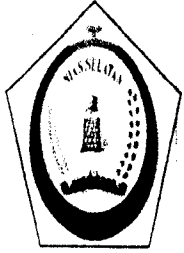
Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB



THERESIA DUHA, SKM
Penata
NIP. 19740216 200502 2 002



NELI ROSMARIYANA LAIA, SKM., M.AP
Penata
NIP. 19830615 200502 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

*Jalan Fahuwusa Laia, Komplek Baloho Indah Kec. Teluk Dalam
Kode Pos 22865, Email: p2kbp3anisel@gmail.com*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IDA KRISNAWATI WAU, AMK**

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **THERESIA DUHA, SKM**

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 07 November 2022

Pihak Kedua,

THERESIA DUHA, SKM

Penata, III/c

NIP. 19740216 200502 2 002

Pihak Pertama,

IDA KRISNAWATI WAU, AMK

Penata, III/c

NIP. 19741128 200611 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALOKON

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya pelayanan pendistribusian Alokon di Faskes KB	Tersedianya Alokon di Faskes KB	37 Faskes KB
2.	Terlaksananya pengepakan/pemaketan Alokon di gudang Kabupaten	Terlaksananya operasional di gudang alokon	37 Faskes KB
3.	Terlaksananya administrasi pencatatan dan pelaporan setiap bulan	Terpenuhinya laporan bulanan dan tahunan	12 Bulan

No (1)	Kegiatan (2)	Anggaran (3)
1.	Monitoring dan evaluasi Alokon di Faskes KB	

Teluk Dalam, 07 November 2022

Kepala Bidang KB,



THERESIA DUHA, SKM
 Penata
 NIP. 19740216 200502 2 002

Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon,



IDA KRISNAWATI WAU, AMK
 Penata
 NIP. 19741128 200611 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl.Fahuwusa Laia No.-Komplek Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam
Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FILIRIA LAOWO, AMK**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.Ns.MKM**

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 08 November 2022

Pihak Kedua,

SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.Ns.MKM
NIP.198108102001122001

Pihak Pertama,

FILIRIA LAOWO, AMK
NIP.19830908200502200


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.NIAS SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pemenuhan Hak Anak	Pembinaan dan evaluasi Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa	17 x
2.	Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan informasi gender dan anak.	Jumlah data kekerasan terhadap perempuan dan anak	35 kecamatan
3.	Melaksanakan kegiatan persiapan RAD KLA	Mengumpulkan data berbasis hak anak	5 x

	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Monitoring dan evaluasi Forum Anak		
2.	Pembinaan dan penyuluhan terhadap perempuan dan anak		
3.			
4.			
5.			

Telukdalam, 08 November 2022

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
 Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan


 SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.Ns.MKM
 Pembina, IV/a
 NIP. 198108102001122001

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
 dan Perlindungan Anak
 Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan


 FILIRIA LAOWO, AMK
 Penata, III/c
 NIP. 198309082005022001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Fahuwusa Laia No.-Komplek Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam
Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MEIMESRAWATI SARUMAHA, SKM, MKM**
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Anak DP2KBP3A
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **FILIRIA LAOWO, AMK**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

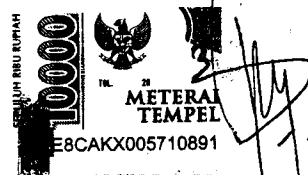
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 07 November 2022

Pihak Kedua

FILIRIA LAOWO, AMK
Penata, III/c
NIP. 19830908 200502 2 001

Pihak Pertama,



MEIMESRAWATI SARUMAHA SKM, MKM
Pembina, IV/a
NIP. 19690512 199303 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Saonigeho Km. 3,5 Telukdalam, Nias Selatan (22865), Sumatera Utara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IDAYANTI RIANG SARUMAHA, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : FILIRIA LAOWO, AMK
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selaku atasan pihak pertama , selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 08 November 2022

Pihak kedua,

FILIRIA LAOWO, AMK
Penata
NIP. 19830908 200502 2 001



IDA YANTI RIANG SARUMAHA, SKM
Penata
NIP. 19801110 200502 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl.Fahuwusa Laia No.-Komplek Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam
Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MEI PUTRIANI LAOLI, S.Kep., M.A.P**
Jabatan : Kepala Seksi Informasi Gender dan Anak
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **FILIRIA LAOWO, AMK**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan ~~serta akan~~ melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang ~~diperlukan~~ dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 07 November 2022

Pihak Kedua,

FILIRIA LAOWO, AMK
NIP. 19830908 200502 2 001

Pihak Pertama,

MEI PUTRIANI LAOLI, S.Kep., M.A.P
NIP.19880529 201403 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI INFORMASI GENDER DAN ANAK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.NIAS SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terhimpunnya dan Terolahnya Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	35 Kecamatan
2.	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan terhadap Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan Hukum	Meningkatnya Pendampingan terhadap Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan Hukum	12 Kali
3.			

	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Data Pelaporan		
2.	Kegiatan Pelatihan Penggunaan dan Pengelolaan Website (e-gov)		
3.			
4.			
5.			

Telukdalam, 07 November 2022

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan



FILIRIA LAOWO, AMK
 Penata, III/c
 NIP. 19830908 200502 2 001

Kepala Seksi Informasi Gender dan Anak.
 Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan



MEI PUTRIANI LAOLI, S.Kep., M.A.P
 Penata, III/c
 NIP. 19880529 201403 2 005

LAMPIRAN - 4

PERJANJIAN KINERJA

BERDASARKAN DPA

PERUBAHAN

TA. 2022



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Fahuwusa Laia No. – Kompleks Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam, Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SWASTI ELISABET DUHA, S.Kep., Ns., M.K.M**
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

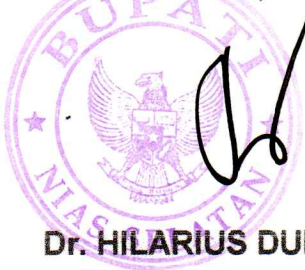
Nama : **Dr. HILIARIUS DUHA, SH., MH**
Jabatan : **BUPATI NIAS SELATAN**
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,



Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH

PIHAK PERTAMA,



SWASTI ELISABET DUHA, S.Kep., Ns., M.K.M
Pembina
NIP. 19810810 200112 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

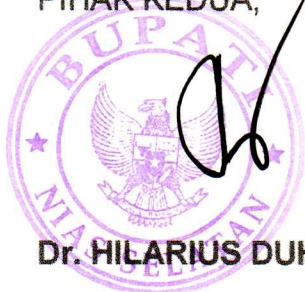
NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan baik	1.1 Nilai Lakip	C
		1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat	C
2.	Terwujudnya SDM yang Sehat, Cerdas dan berdaya saing	2.1 Persentase KB Aktif	45%
		2.2 Angka Unmet Need KB	45%
		2.3 Pesentase Kelompok BKB, BKR, BKL (Tribina di Kabupaten Nias Selatan)	80%
		2.4 Total Fertility Rate (TFR)	3,5

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	375.506.800	
2.	Program Pengendalian Penduduk	110.400.000	
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.084.611.800	
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.128.170.000	
Jumlah		8.698.688.600	

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH

SWASTI ELISABET DUHA, S.Kep., Ns., M.K.M
Pembina

NIP. 19810810 200112 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Fahuwusa Laia No. – Kompleks Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam, Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FIKTORYAMAN GE'E, SKM., M.MKes**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.,Ns.,M.K.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan**

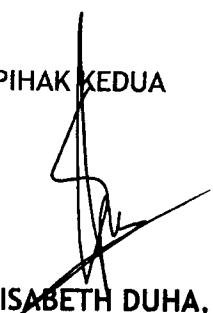
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

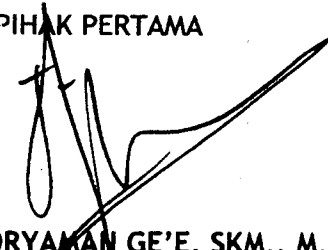
Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA


SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.,Ns.,M.K.M
Pembina
NIP. 198108102001122001

PIHAK PERTAMA


FIKTORYAMAN GE'E, SKM., M.Mkes
Penata TK. I
NIP. 198306192010011027

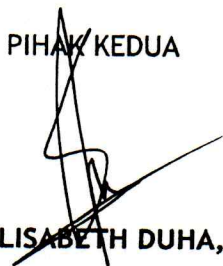
**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN	TARGET 2022
1.	Mewujudkan administrasi perkantoran secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta Melaksanakan kegiatan surat menyurat secara cepat, tepat dan efektif.	1. Persentase pelayanan administrasi kantor yang meningkat 100 % 2. Persentase jumlah penerimaan dan pengiriman surat yang teragendakan. 100 %

NO	ANGGARAN	KET
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.001.800
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.019.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3.030.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.079.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.030.000
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.001.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.001.500
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.580.500
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.298.000
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.200.000
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.800.000
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.466.000

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA

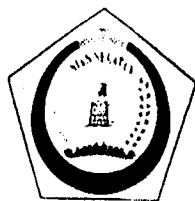


SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.,Ns.,M.K.M
Pembina
NIP. 198108102001122001

PIHAK PERTAMA



FIKTOR YAMAN GE'E, SKM., M.Mkes
Penata Tk. I
NIP. 198306192010011027



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Fahuwusa Laia No. – Kompleks Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam, Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RALATI MANAO, SKM**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Sarana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **FIKTORYAMAN GE'E, SKM., M.MKes**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

FIKTORYAMAN GE'E, SKM., M.MKes
Penata TK. I
NIP. 19830619 2010011027

RALATI MANAO, SKM
Penata Muda
NIP. 19760525 200804 2 001

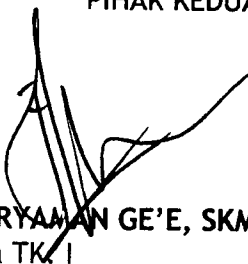
**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN SARANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NIAS
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Tertatanya administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program.	1. Jumlah Dokumen SPP-LS, SPP-GU, SPP-TU yang suda diteliti dan diverifikasi.	100 %
		2. Dokumen rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya	70%
		3. Jumlah Laporan Kegiatan Sub Bagian Keuangan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.001.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.001.500	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.580.500	
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.200.000	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.800.000	
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.466.000	

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA

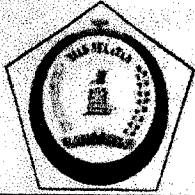


FIKTORYAN GE'E, SKM., M.Mkes
Penata TK I
NIP. 19830619 2010011027

PIHAK PERTAMA



RALATI MANAO, SKM
Penata Muda
NIP. 19760525 200804 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Fahuwusa Laia No. – Kompleks Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam, Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **THERESIA DUHA, SKM**
Jabatan : **Kepala Bidang Kelurga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.,.Ns.,M.K.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan**

Selaku Atasan Pihak Pertama,selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

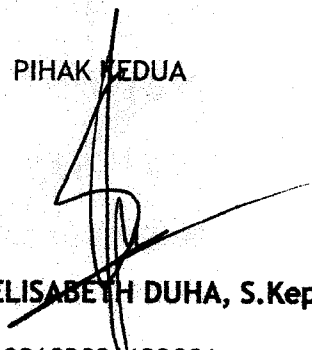
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.,.Ns.,M.K.M
Pembina
NIP. 198108102001122001


THERESIA DUHA, SKM
Penata
NIP. 19740216 200502 2 002

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NIAS
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Terjalinnnya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai kearifan budaya lokal	Tertersedianya komunikasi informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	1 Kegiatan
2.	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaring	Tersedianya Laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	1 Kegiatan

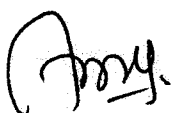
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	<p>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri <p>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</p>	Rp 1.543.946.800	

Teluk dalam, November 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


SWASTI ELISABETH DUHA, S.Kep.,Ns.,M.K.M
 Pembina
 NIP. 198108102001122001


THERESIA DUHA,SKM
 Penata
 NIP. 19740216 200502 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Fahuwusa Laia No. – Kompleks Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam, Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NELI ROSMARIYANA LAIA, SKM**
Jabatan : **Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana**
Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **THERESIA DUHA, SKM**
Jabatan : **Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan**
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, Nopember 2022

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

THERESIA DUHA, SKM
Penata
NIP. 19740216 200502 2 002

NELI ROSMARIYANA LAIA, SKM
Penata
NIP. 19830615 200502 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI JAMINAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Meningkatnya pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase KB aktif	45%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.092.105.100	
2	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2.212.800.000	
Jumlah		3.304.905.100	

Teluk Dalam, Nopember 2022

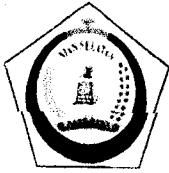
PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,




THERESIA DUHA, SKM
 Penata
 NIP. 19740216 200502 2 002

NELI ROSMARIYANA LAIA, SKM
 Penata
 NIP. 19830615 200502 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Fahuwusa Laia No. – Kompleks Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam, Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ida Krisnawati Wau, AMK**
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi
Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **THERESIA DUHA, SKM**
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, Nopember 2022

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

THERESIA DUHA, SKM
Penata
NIP. 19740216 200502 2 002

Ida Krisnawati Wau, AMK
Penata
NIP. 19741128 200611 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PENGENDALIAN DAM PENDISTRIBUSIAN ALAT KONTRASEPSI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan	Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	451.222.900	
Jumlah		451.456.900	

PIHAK KEDUA,



THERESIA DUHA, SKM
 Penata
 NIP. 19740216 200502 2 002

Teluk Dalam, 03 Januari 2022

PIHAK PERTAMA,



Ida Krisnawati Wau, AMK
 Penata
 NIP. 19741128 200611 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Fahuwusa Laia No. – Kompleks Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam, Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FENTI SISWADI HALAWA, S.Kep., Ns**
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB
Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **THERESIA DUHA, SKM**
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, Nopember 2022

PIHAK KEDUA,

THERESIA DUHA, SKM
Penata
NIP. 19740216 200502 2 002

PIHAK PERTAMA,

FENTI SISWADI HALAWA, S.Kep., Ns
Penata Tk.I
NIP. 19760302 200502 1 002

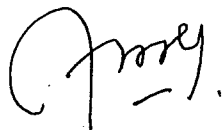
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESERTAAN BER-KB
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	78 Kampung KB

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.327.865.000	
Jumlah		1.327.865.000	

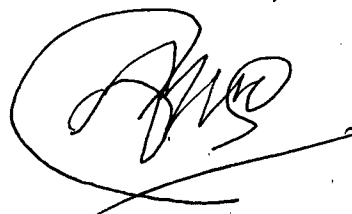
Teluk Dalam, ~~November~~ 2022

PIHAK KEDUA,



THERESIA DUHA, SKM
 Penata
 NIP. 19740216 200502 2 002

PIHAK PERTAMA,



FENTI SISWADI HALAWA, S.Kep., Ns
 Penata Tk.I
 NIP. 19760302 200502 1 002

LAMPIRAN - 5

DOKUMENTASI KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN
DINAS P2KBP3A KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022



Kegiatan Lokakarya Mini di Kecamatan Fanayama



Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan sebagai salah satu Narasumber pada Forum Konsultasi Publik



Pendampingan Fasilitator oleh Tim dari BKKBN Perwakilan Sumatera Utara



Capacity Building oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sumatera Utara di UPTD. Puskesmas Teluk Dalam



Pelayanan KB di UPTD. Puskesmas Teluk Dalam



Kegiatan Rumah Dataku, Desa Hilimagari, Kec. Toma



Desiminasi Audit Kasus Stunting oleh Tim Pakar



Pemberian Piagam Penghargaan Kepada Bapak Asuh Stunting



**Medias Kekerasan Kepada Anak (Perempuan) di Kantor Dinas P2KBP3A
Kab. Nias Selatan**



**Kerjasama dengan Polres Nias Selatan dalam menangani Kasus Kekerasan
Kepada Anak Wilayah Hukum Kab. Nias Selatan**